BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Kabupaten Malinau merupakan satu kabupaten dari empat kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Letak Geografis Kabupaten Malinau adalah 114°35'22" sampai dengan 116°50'55“ BT dan 1°21'36 sampai dengan 4°10'55” LU. Kabupaten Malinau juga merupakan satu kabupaten dari dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Secara lengkap batas wilayah Kabupaten Malinau adalah di sebelah Barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 40.088,38Km², dengan kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur) yang membentang sepanjang kurang lebih 438 Km dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu, dan merupakan kabupaten terluas yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

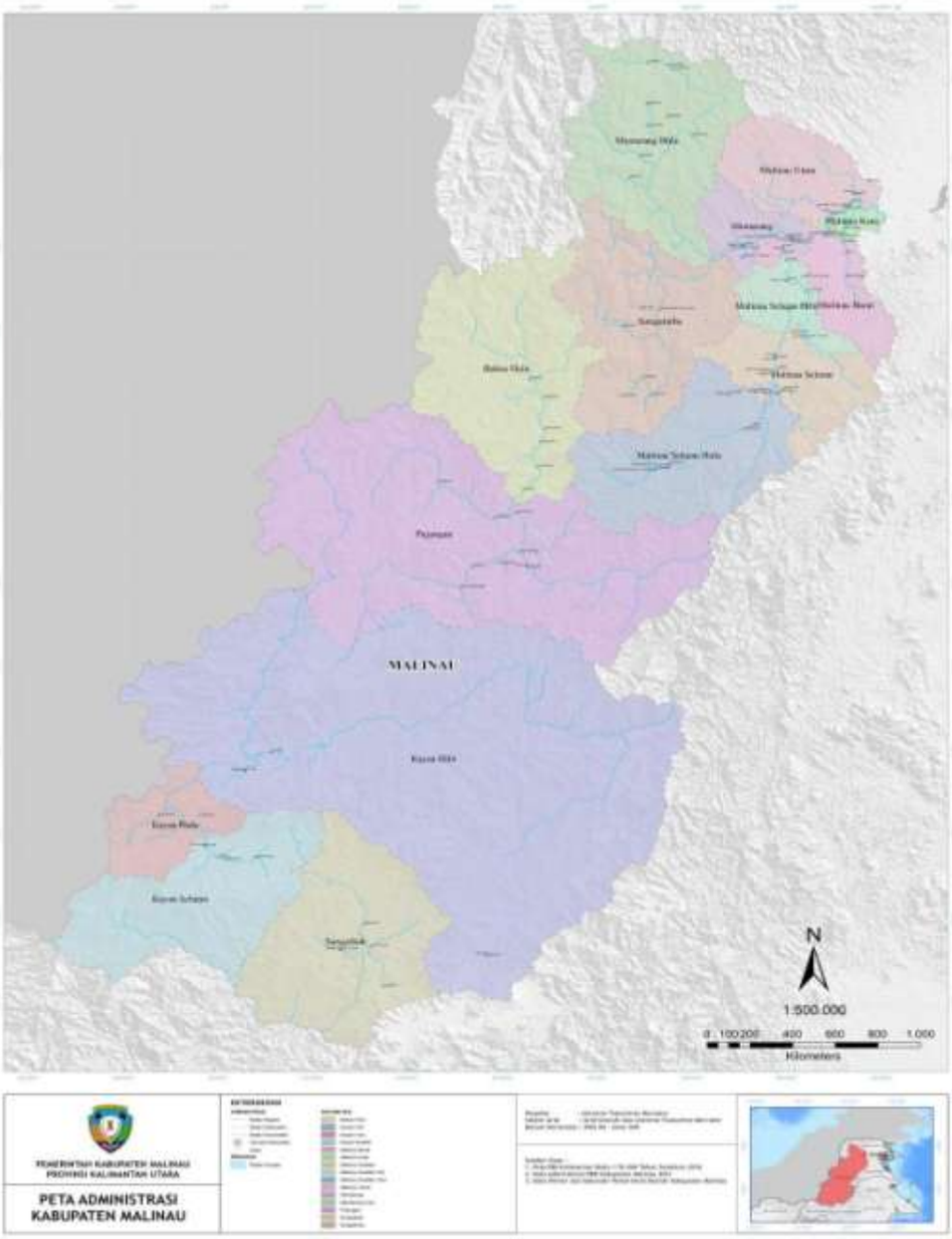

Sumber: *Kabupaten Malinau Dalam Angka (2020)*

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau terdiri atas 15 Kecamatan dengan luasan wilayah yang tidak terdistribusi secara merata antar masing-masing kecamatan. Kecamatan Kayan Hilir merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Malinau, yakni dengan luas wilayah 11.863,19 km² atau 29,59 % dari luas wilayah Kabupaten Malinau, sedangkan kecamatan yang paling kecil luasannya adalah Kecamatan Malinau Kota dengan luas wilayah hanya 142,07 km² atau 0,35 % dari luas wilayah Kabupaten Malinau. Secara rinci berkenaan dengan kecamatan dan luasannya disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau

Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase (%)
Sungai Boh	3.112,18	7,76
Kayan Selatan	3.138,59	7,83
Kayan Hulu	735,40	1,83
Kayan Hilir	11.863,19	29,59
Pujungan	6.539,39	16,31
Bahau Hulu	3.098,98	7,73
Sungai Tubu	2.243,78	5,60
Malinau Selatan Hulu	2.171,14	5,42
Malinau Selatan	1.153,35	2,88
Malinau Selatan Hilir	572,20	1,43
Mentarang	535,15	1,33
Mentarang Hulu	2.924,65	7,30
Malinau Utara	1.091,19	2,72
Malinau Barat	767,12	1,91
Malinau Kota	142,07	0,35
Kabupaten Malinau	40.088,38	100

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka (2021)

Dari beberapa kecamatan yang termuat pada tabel 2.1 terdapat 5 (lima) kecamatan terletak di kawasan perbatasan dan pedalaman yang meliputi Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Sungai Boh, kecamatan-kecamatan tesebut merupakan manifestasi dari kedaulatan negara. Dimana kawasan kecamatan tersebut mempunyai peranan dan potensi penting dalam kepastian batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, keutuhan wilayah serta pertahanan dan keamanan.

2. Kondisi Topografi

Berdasarkan peta topografi wilayah Kabupaten Malinau lebih didominasi oleh dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan, denganketinggian wilayah berkisar antara 0–3.000 m diatas permukaan laut (dpl). Kecamatan yang berada di daerah dengan ketinggian lebih dari 300 dpl meliputi 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Bahau Hulu dan Kecamatan Mentarang Hulu, dengan cakupan luas mencapai 23.782,18 km² atau 61,02% dari luas Kabupaten Malinau. Terdapat 5 (lima) kecamatan yang berada pada wilayah dataran kurang dari 100 mdpl, yaitu Kecamatan Malinau Selatan (83,30 mdpl), Kecamatan Malinau Barat (63,20 m dpl), Kecamatan

Mentarang (63,00 m dpl), Kecamatan Malinau Kota (62,00 m dpl) dan Malinau Utara (59,07 m dpl). Daerah dataran rendah yang subur pada umumnya dijumpai di kawasan sepanjang sungai khususnya di Kecamatan Malinau, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, sepanjang sungai Malinau, sungai Semendurut, sungai Sembuak, Salap dan sebagian di Ibu Kota Kecamatan Mentarang.

Daerah dataran tinggi yang terjal, pegunungan dan perbukitan yang ditumbuhi hutan belantara berada di sebagian Kecamatan Mentarang, Kecamatan Mentaran Hulu, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Kayan Selatan, dan Kecamatan Sungai Boh. Daerah ini merupakan wilayah-wilayah berperan strategis bagi kelestarian lingkungan wilayah sekitarnya yang lebih rendah datarannya, sehingga kelestarian kawasan hutan di wilayah ini menjadi sebuah keniscayaan. Secara rinci berkenaan dengan luas dan tinggi dpl untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Malinau disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Tinggi Rata-Rata Kecamatan Lingkup Kabupaten Malinau

Kecamatan	Ibu Kota	Luas (Km²)	Tinggi dpl (m)
Sungai Boh	Mahak Baru	3.112,18	566,2
Kayan Selatan	Long Ampung	3.138,59	744,4
Kayan Hulu	Long Nawang	735,40	611,1
Kayan Hilir	Data Dian	11.863,19	604,2
Pujungan	Long Pujungan	6.539,39	267,9
Bahau Hulu	Long Alango	3.098,98	416,0
Sungai Tubu	Long Pada	2.243,78	n.a
Malinau Selatan Hulu	Metut	2.171,14	n.a
Malinau Selatan	Long Loreh	1.153,35	83,3
Malinau Selatan Hilir	Setarap	572,20	n.a
Mentarang	Pulau Sapi	535,15	63,0
Mentarang Hulu	Long Berang	2.924,65	423,7
Malinau Utara	Malinau Seberang	1.091,19	59,7
Malinau Barat	Tanjung Lapang	767,12	63,2
Malinau Kota	Malinau Kota	142,07	62,0
Kabupaten Malinau		40.088,38	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Malinau (diolah) dan Kabupaten Malinau Dalam Angka (2020)

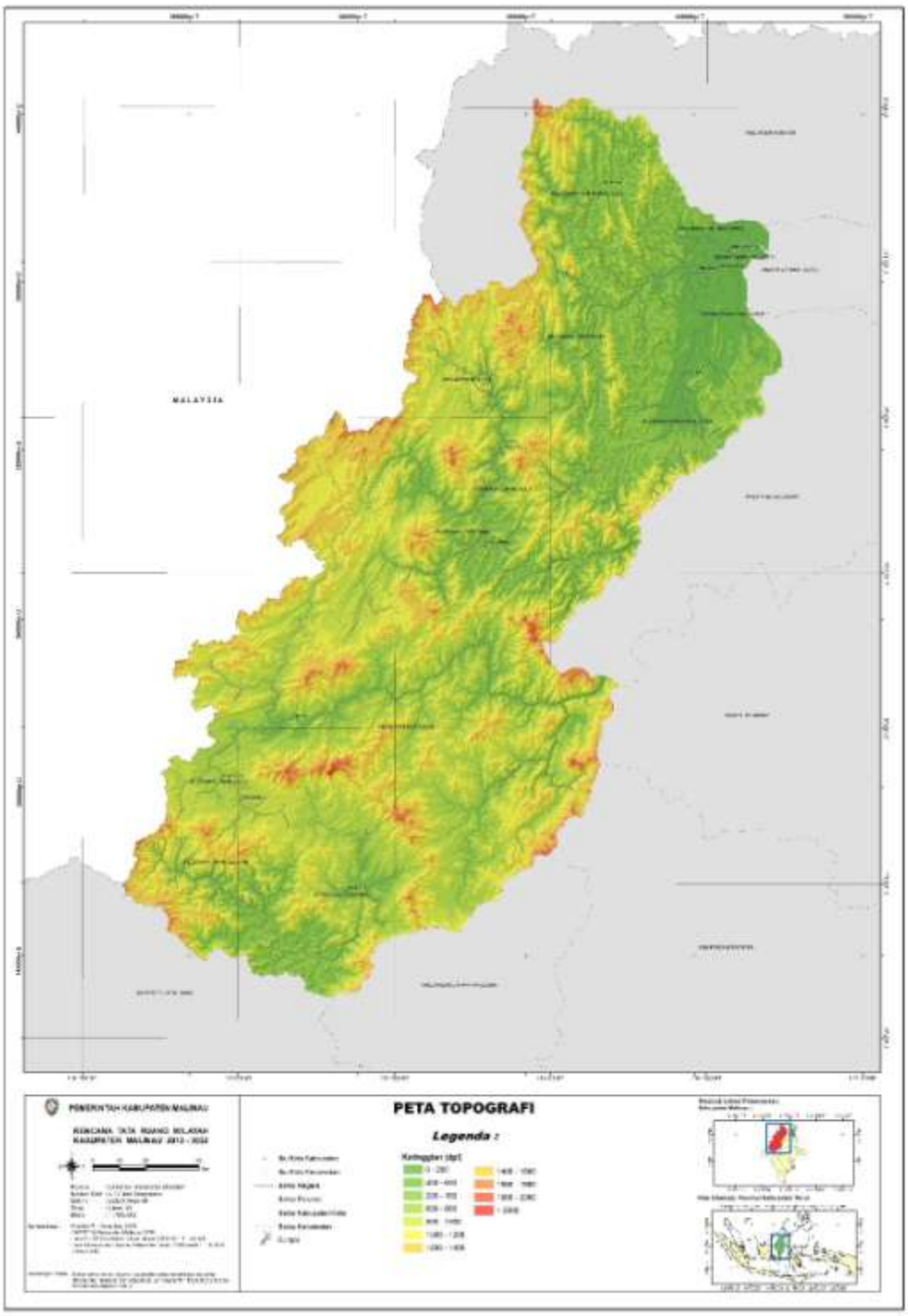

Gambar 2. 2Peta Topografi Kabupaten Malinau
Sumber RTRW Kabupaten Malinau 2012-2032

3. Kondisi Morfologi

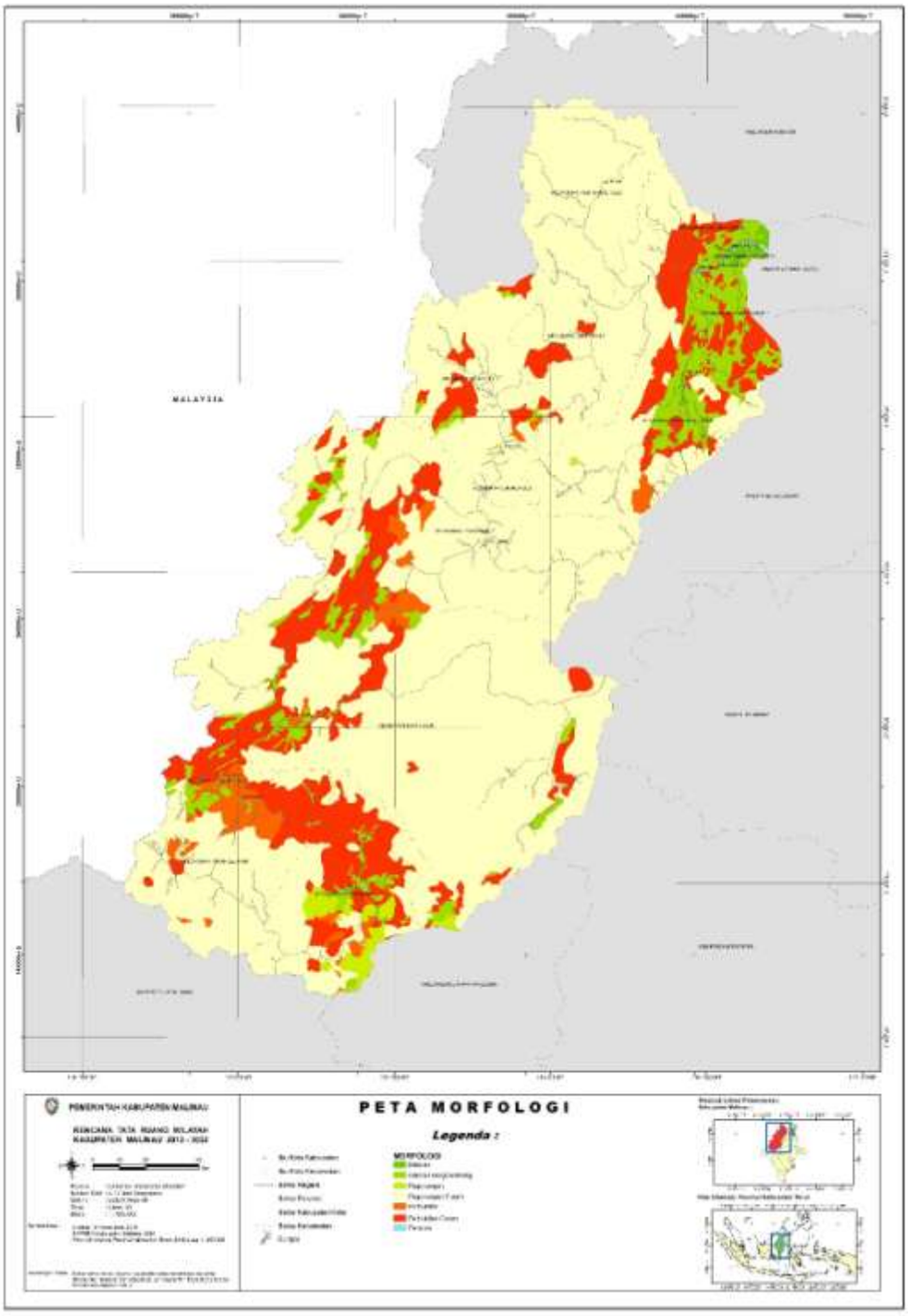

Gambar 2. 3Peta Morfologi Kabupaten Malinau
Sumber RTRW Kabupaten Malinau 2012-2023

Berdasarkan interpertasi pada peta geologi lembar Malinau skala 1:250.000 (1995) geomorfologi daerah Malinau dan sekitarnya dapat dibagi atas dua satuan morfologi sebagai berikut:

1) Satuan Morfologi Dataran

Satuan morfologi dataran merupakan daerah dataran aluvium yang mendominasi daerah Malinau pada ketinggian

berkisar atara 15 – 25 m diatas muka laut. Sungai utama adalah Sungai Sesayap yang mengalir dari arah timur ke barat dengan anak-anak sungai yang bermuara daerah pegunungan di daerah timur. Sungai Sesayap berbentuk meander yang lebih ke arah timur menuju laut di selat Makasar. Proses meandering sungai Sesayap ini akibat dari kondisi batuan pada satuan aluvium yang berupa lumpur, lanau, pasir, kerikil, sampai kerakal, dan bersifat lepas. Bentuk sungai Sesayap ini berbentuk "U" yang menandakan stadia sungai ini stadia dewasa sampai stadia tua.

2) Satuan Morfologi pebukitan rendah-tinggi

Satuan morfologi pebukitan rendah-tinggi ini mendominasi daerah bagian timur dari kota Malinau dan membentang dari utara ke selatan. Pada satuan morfologi ini merupakan hutan belukar membentuk tapal kuda mengelilingi kota Malinau. Satuan morfologi berkisar antara 50-100 m di atas muka laut dengan kemiringan lereng berkisar antara 10–150 dengan batuan penyusunnya terdiri dari konglomerat, batu-pasir, batu lempeng dan batu gamping terumbu.Pada satuan morfologi perbukitan tinggi umumnya menempati daerah bagian barat dengan elevasi berkisar antara 100–200 m diatas muka laut dengan kemiringan lereng antara 20–250. Pada satuan morfologi perbukitan tinggi batuan penyusunnya terdiri dari batu pasir, batu lempung, serpih, dan setempat breksi dan konglomerat. Secara stratigrafi umur batuan pada satuan morfologi perbukitan tinggi lebih tua (kapur akhir s/d Paleosen) dari pada satuan batuan pada satuan morfologi pebukitan rendah (umur Eosen Tengah sampai dengan Eosen Akhir). Pola aliran sungai (drainage pattern) berupa pola aliran dendririk berbentuk menyerupai cabang-cabang pohon yang mencerminkan kekerasan batuan yang sama atau soil seragam dengan lapisan batuan sedang horisontal atau miring landai serta kontrol struktur tidak begitu tampak jelas. Pola aliran sungai dendritik ini mengalir dari bagian puncak pebukitan dengan arah lembah sungai yang tidak teratur dan mengalir menuju ke arah sungai induk yaitu sungai sesayap.

1. Batuan penyusun dan stratigrafi

1) Batuan Penyusun

Dalam penafsiran batuan (litologi), dilihat dari pola dan sifat garis kontur, maka hasil penafsiran litologi dapat dibedakan antara lain :

I. Batuan keras (litologi resisten) dicirikan oleh morfologi yang relatif tinggi dengan pola kontur rapat.

II. Batuan lunak (litologi non resisten) dicirikan oleh morfologi yang relatif landai dengan pola kontur rendah.

III. Batuan urai (endapan alluvial).

IV. Batuan karbonat dicirikan oleh kenampakkan pebukitan karst (dolina, uvala, dan lainnya).

V. Intrusi, dicirikan oleh pola kontur yang melingkar dan berbeda dengan pola kontur sekitarnya (merupakan bukit terisolir).

Atas dasar penafsiran batuan (litologi) tersebut diatas, maka batuan penyusun daerah Malinau dan sekitarnya berdasarkan pada peta geologi lembar Malinau skala 1 : 250.000 (Heryanto, cs, 1995), secara stratigrafi dari batuan berumur muda sampai batuan berumur tua adalah sebagai berikut:

I. Satuan aluvium (Qa): Terdiri dari lumpur, lanau, pasir, kerikil dan kerakal, diendapkan pada umur Holosen.

II. Satuan batuan sumbat, retas (Tma): Terdiri dari andesit, basalt, andesit-basalt, trakit, berumur Miosen Akhir.

Formasi Langap (Tml): Terdiri dari tuf putih, kapuran, konglomerat, komponen sekitar 80% dan 90% berupa batu pasir lempungan dan kwarsa susu, matriks batu pasir kasar, menampakkan struktur silang-siur, mengandung beberapa lapisan tebal batu bara. Berumur Miosen Akhir. Batuan gunungapi jelai (Tomj): Terdiri dari breksi vulkanik, tuf, breksi lava. Leleran lava bersusun basalt-andisitan. Formasi Sebakung (Tes): terdiri dari konglomerat alas, batu lempung, batu lanau, dan batu gamping terumbu, kaya akan ganggang, foraminifera, koral, moluska dan gastropoda. Umur Eosen Tengah-Eosa Akhir. Diendapkan dalam laut dangkal, tebal satuan batuan ini paling sedikit 300 m. Formasi Malinau (Tema): terdiri dari batu pasir,

felsparan, lempungan dan mikaan, warna kelabu kehijauan berbutir sedang sampai kasar, terpilah buruk, tebal lapisan 20–50 cm, setempat beberapa meter, berselingan dengan batu lanau lempungan atau argilit, warna kelabu tua – hitam, mikaan dan gampingan. Umur Eosen Tengah. Diendapkan dalam lingkungan laut dangkal.

Formasi Mentarang Kelompok Embaluh (KTme): Terdiri dari batu pasir, warna kelabu mengandung sedikit fragmen batuan, setempat breksi dan konglomerat, endapan flish, umur Kapur Akhir-Paleosen, mungkin diendapkan dalam lereng benua pada tepi cekungan samudera. Formasi Lurah Kelompok Embaluh (KTlu): Terdiri dari batu pasir (sub-grewake); kehijauan, felsparan dan mikaan, berbutir halus – sedang, tebal lapisan beberapa desimeter sampai meter, pada bagian atasnya ditempati batu gamping, batu lanau, dan argilit, umur diduga Kapur Akhir sampai Paleosen. Lingkungan pengendapannya mungkin pada tepi benua “marginal flysch”. Formasi Long Bawan, Kelompok Embalu (KTlb): Terdiri dari argilit, warna jingga, hijau atau kelabu muda, berlapis felsparan, dan arkose kelabu, kaya akan bahan organik, mikaan, tebal lapisan dari beberapa desimeter sampai beberapa meter, mengandung evaporit air garam dan lapisan batubara dengan tebal sekitar 0,5 – 1,5m. Umur diduga Paleosen. Lingkungan pengendapannya fluviatil sampai lagon. Formasi Paking (Mpa): Terdiri dari sekis serisit dan sekis klorit, warna kelabu kehijauan, fasies sekis hijau, menunjukkan perdaunan (foliasi). Umur diduga Kapur Awal atau lebih tua. Ultramafik (Mub): Terdiri dari serpentinit, gabro terbreksikan, berdasarkan posisi stratigrafi dan kolerasi dengan lembar lainnya, diduga berumur Yura Akhir.

2) Stratigrafi

Hubungan secara stratigrafi dari satuan batuan di daerah Malinau dan sekitarnya, batuan yang dianggap sebagai batuan yang paling tua adalah batuan-batuan pada Formasi Paking, yang diduga umurnya Kapur Awal atau lebih tua. Sedangkan batuan-batuan pada kelompok batuan ultramafik (ultra basa)

hanya didasarkan pada posisi stratigrafi dan kolerasi dengan lembar lainnya dan diduga berumur Jura Akhir. Hubungan stratigrafi antara kelompok batuan ultramafik terletak selaras dibawah satuan batuan pada formasi Paking. Diatas Formasi Paking diendapkan satuan batuan dari hubungan stratigrafi secara tidak selaras (uncomfornity), karena adanya selang waktu dalam proses pengendapan. Satuan batuan Formasi Long Bawan Kelompok Embalu ini merupakan "Anggota" dari satuan batuan Formasi Lurah Kelompok Embalu yang berumur Kapur Akhir sampai Paleosen. Selanjutnya antara satuan batuan Formasi Lurah Kelompok Embaluh diendapkan dalam umur yang sama (Kapur Akhir sampai Paleosen) adalah satuan batuan Formasi Mentarang Kelompok Embaluh dengan hubungan stratigrafi secara tidak selaras karena terjadi selang waktu pengendapan dibarengi dengan kegiatan tektonik pada umur Eosen Awal. Pada umur yang bersamaan (Eosen Awal) diendapkan satuan batuan Formasi Sebakung, dengan hubungan stratigrafi secara menjari dengan satuan batuan Formasi Malinau. Diatas satuan batuan Formasi Sebakung diendapkan secara selaras satuan Formasi Batuan Gunungapi Jelai umur Moisen Awal, kemudian pengendapan selanjutnya secara tidak selaras karena adanya kegiatan tektonik, yaitu satuan batuan Formasi Langap umur Miosen Akhir, dan kegiatan tektonik dengan adanya selang waktu pengendapan terjadi pada umur Miosen Tengah, dan dalam waktu yang bersamaan yaitu pada umur Miosen Akhir diendapkan satuan batuan berupa sumbat atau netas berupa batuan terobosan (dike). Pada pengendapan terakhir yaitu Holosen diendapkan satuan batuan aluvium yang merupakan batuan sedimen urai (lepas) yang nampak di permukaan tanah, dan antara satuan batuan Formasi Langap dengan satuan batuan aluvium terdapat bidang erosi pada umur Pleistosen. Adapun uraian tentang hubungan stratigrafi dari satuan-satuan batuan pada lembar Malinau, didasarkan pada interpretasi Kolerasi Satuan Peta.

4. Kondisi Klimatologi

Mengacu pada data iklim yang bersumber dari stasiun yang ada di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau merupakan wilayah bercirikan iklim tropis basah, karena Kabupaten Malinau memiliki curah hujan yang tinggi (2.377,3 mm/th),kelembaban udara yang tinggi (49-99%), temperatur (suhu) tahunan di atas22°C dan dapat mencapai 36,3°C pada musim kemarau (Lihat Tabel 2.3). Selain itu, perbedaan antar musim tidak terlalu terlihat, kecuali periode sedikit hujan dan banyak hujan.

Curah hujan yang tinggi yang terjadi di Kabupaten Malinau merupakan anugrah, karena air hujan ini memiliki fungsi utama dalam menjaga siklus air di wilayah ini. Dengan siklus air yang baik, maka berbagai manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Malinau. Manfaat tersebut antara lain adalah terairinya lahan-lahan pertanian, tersimpannya cadangan air yang dapat digunakan di musim kemarau, terjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di wilayah ini, tersedianya sumber air minum, terjaganya kesuburan tanah, terjaganya kelestarian hutan dan dapat berfungsinya sarana transportasi air bagi mobilisasi manusia dan barang. Peta sebaran curah hujan dapat dilihat pada gambar 2.4.

Tabel 2.3
Kondisi Iklim Kabupaten Malinau

Uraian Komponen Iklim	Nilai Pengamatan
Suhu/Temperatur (^{0}C)	
- *Maksimum*	34,8
- *Minimum*	23,2
- *Rata-rata*	27,5
Kelembaban Udara (%)	
- *Maksimum*	99,0
- *Minimum*	51,6
- *Rata-rata*	85,7
Tekanan Udara (mb)	1.010,1
Kecepatan Angin (m/dt)	3
Curah Hujan (mm/th)	2.377,3

Sumber: Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan, Kab. Bulungan dalamKabupatenMalinau Dalam Angka (2020)

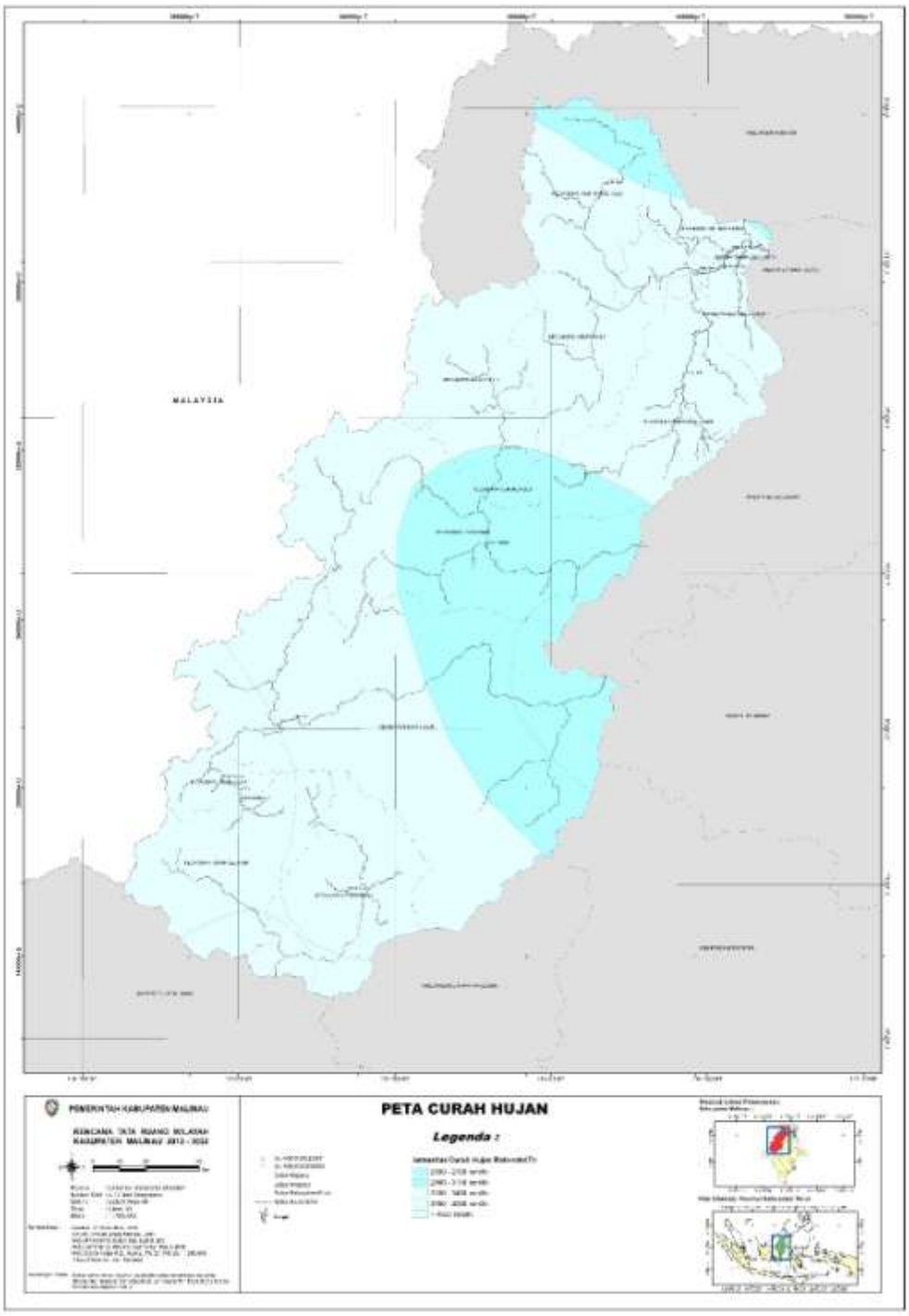

Gambar 2. 4 Peta Curah Hujan
Sumber RTRW Kabupaten Malinau 2012-2032

5. Kondisi Geologi

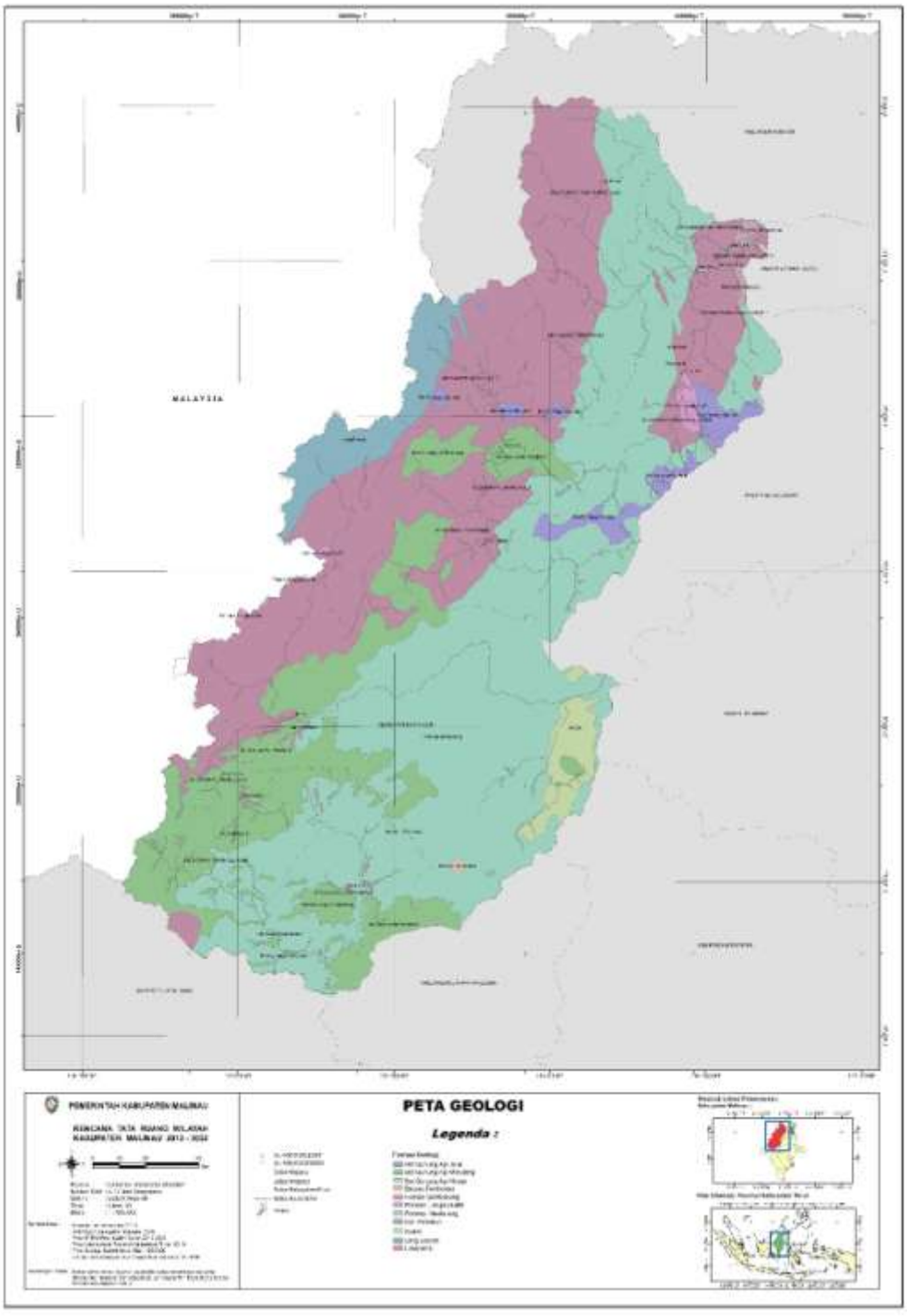

Gambar 2. 5Peta Geologi
Sumber : RTRW Kabupaten Malinau 2012-2023

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Malinau mencakup daerah yang sangat luas dan umumnya tersusun oleh batuan-batuan sedimen yang kompak dan batuan-batuan gunung api tua. Morfologi perbukitan bergelombang kasar dan morfologi terjal umumnya meliputi daerah- daerah perbukitan terjal serta tersusun oleh batuan sedimen berumur tua yang mengalami

pengangkatan, pelipatan dan pesesaran. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Malinau terutam didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk yang miskin hara. Inceptisol adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna coklat kemerahan dan relatif agak subur, Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan merupakan hasil pengendapan dan doposisi longsoran tanah lainnya. Spodosol adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat masam dengan kesuburan tanah yang rendah. Struktur Geologi suatu daerah gambaran secara regional sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah didalam menganalisanya karena didalam pembentukan struktur geologi gaya yang bekerja lebih bersifat regional, dan merupakan satu kesatuan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara struktur geologi suatu daerah dengan struktur geologi regional lebih cenderung disebabkan akibat telah terjadinya reorientasi dari gaya utama yang bekerja.

Berdasarkan interpretasi pada peta geologi lembar Malinau skala 1:250.000 (Heryanto,cs,1995), struktur geologi pada lembar Malinau ini adalah struktur lipatan (fold) yaitu sinklin dan antiklin serta struktur sesar atau patahan (Fault) yaitu sesar normal (normal fault), sesar mendatar (transversal fault atau strike slip fault) dan sesar naik (reserve fault). Struktur lipatan sinklin maupun antiklin umumnya memperlihatkan arah sumbu lipatan hampir utara-selatan. Struktur lipatan ini diikuti oleh struktur sesar, terutama sesar naik (reserve fault) yang searah dengan sumbu lipatan, serta sesar mendatar mengiri (sinistral) berarah umum ke barat laut – tenggara.

Struktur sesar ini merupakan struktur geologi yang paling dominan di daerah Malinau. Korelasi dengan struktur geologi pada lembar Long Nawan Skala 1:250.000 (Pieter, Baharudin dan Mangga,1993), terdapat dua buah kawasan struktur utama, yaitu berupa lipatan yang paling mencolok dan terbesar di daerah Kalimantan, yang berarah antara timur dan timur laut. Selain struktur lipatan ini terdapat pula struktur sesar dan rebahan,

dimana sepasang struktur sesar berarah timur laut mengikuti lembah sungai sehingga memberi kesan bahwa struktur sesar tersebut curam sampai tegak, demikian pula sepasang struktur relahan yang saling berhubungan berarah timur laut dan barat daya.

Karakteristik Tanah Secara genesanya tanah terbentuk oleh hasil pelapukan bretus pada kerak bumi, yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama hingga sampai jutaan tahun.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah :

I. Iklim (suhu dan curah hujan)
II. Jasad hidup (terutama vegetasi asli)
III. Batuan sebagai bahan niduk (tekstur dan struktur susunan kimia dan material)
IV. Topografi daerah
V. Waktu yang diperlukan bahan untuk membentuk tanah

Fungsi tanah pada masing-masing sektor tentunya berbeda-beda. Untuk sektor pertanian, tanah sangat penting untuk pertanian. Untuk sektor keteknikan, tanah berfungsi pada daya dukungnya. Untuk sektor pertambangan, tanah itu tidak punya arti, dalam artian apabila ada suatu endapan bahan galian (misalnya batu bara) maka tanah yang ada diatas endapan batu bara tersebut, disingkirkan sehingga endapan batu bara itu tersingkap dan selanjutnya dilakukan penambangan.

Ada tiga golongan pokok tanah yang kini umum dikenal ialah pasir, geluh, dan lempung (dalam Ilmu Tanah, oleh Harry Buckman, terjemahan Soegiman, 1982) sebagai berikut :

a) Pasir

Golongan pasir mencakup semua tanah yang pasirnya meliputi 70% atau lebih dari berat tanah itu. Sifat tanah semacam ini karena mencerminkan sifat pasirnya.

b) Lempung

Tanah dibentuk sebagai tanah lempung jika paling sedikit mengandung 35% lempung, setidak-tidaknya 40%. Selama kandungan lempung 40% atau lebih; nama kelas tanah ialah

lempung pasiran, lempung debuan atau biasanya disebut lempung saja.

c) Geluh

Umumnya geluh itu memiliki kualitas-kualitas pasir dan lempung, tidak terlalu lepas, tanah pertanian ialah geluh. Geluh yang mengandung pasir digolongkan geluh pasiran. Geluh yang mengandung lempeng digolongkan geluh lempungan.

Berdasarkan batuan penyusun secara geologis, pada peta geologi lembar Malinau terdapat batuan pasir (Formasi Qa), lempung (Formasi Te ma), batu pasir (Formasi KTlu), batu lempung angilit (Formasi KTme). Dari klasifikasi tanah berdasarkan Ilmu Tanah, maka pada formasi-formasi batuan lembar Malinau dapat diklasifikasikan pada jenis tanah geluh. Geluh yang mengandung pasir (Formasi Qa) digolongkan pada geluh pasiran, dan geluh yang menganduh lempung (Formasi KTlu, Te ma, dan KTme) digolongkan pada geluh lempungan.

Kalau terdapat jumlah pasir terbanyak, tanah itu bertekstur kasar, dikenal sebagai tanah pasiran atau ringan karena tanah mudah diolah. Sebaliknya tanah bertekstur halus terdiri dari sebagian besar atas debu dan lempung, sifat liat dan lekatnya menentukan tanah sukar diolah atau tanah berat. Istilah-istilah ringan dan berat, dimaksudkan mudah tidaknya tanah dapat diolah.

d) Masalah Gambut

Pembentukan gambut sangat dipengaruhi oleh faktor iklim, keadaan topografi, dan lingkungan setempat. Berdasarkan topografinya dikenal dua macam gambut, yaitu:

1) Gambut Dataran Rendah

Rawa-rawa yang dibatasi tanggul sungai membentuk suatu cekungan yang tergantung endapan baru yang merupakan kolonisasi mangrove yang lama- kelamaan menjadi hutan mangrove. Sisa-sisa tanaman atau serasah yang berupa daun, ranting, atau bagian tanaman yang jatuh selalu jenih air, dan serasah tersebut terus-menerus menumpuk mengisi cekungan. Oleh karena selalu dalam keadaan basah, maka tidak mudah melapuk atau membusuk. Menurut ketebalannya, gambut dibagi

kedalam dua macam, yaitu gambut tipis dan gambut tebal. Gambut tipis (gambut topogen), pembentukannya masih dipengaruhi oleh bahan material. Gambut tebal (gambut ombrogen) umumnya terbentuk jauh dari tepi sungai atau daerah cekungan, dimana akar-akar tanaman tidak sampai ke lapisan batuan/mineral dan hanya mendapat pengaruh air hujan, sehingga gambut tebal lebih sedikit unsur hara. Gambut dataran rendah dijumpai di pantai Timur Sumatera, seluruh pantai Kalimantan, dan Papua bagian selatan.

2) Gambut Pegunungan

Gambut ini terbentuk di pegunungan berhutan lebat dan hawa dingin. Hutan yang lebat menutupi bagian bawahnya dari sinar matahari dan suhu yang rendah tidak memungkinkan terjadinya dekanposisi (pelapukan) bahan organik sehingga sisa-sisa tanaman atau serasah tersebut menumpuk sampai tebal. Penumpukan bahan organik di daerah pegunungan disebut gambut pegunungan. Dijumpai di puncak Gunung Pangrango, Gunung Kerinci, dan gunung lainnya yang berhutan lebat.

6. Kondisi Hidrologi

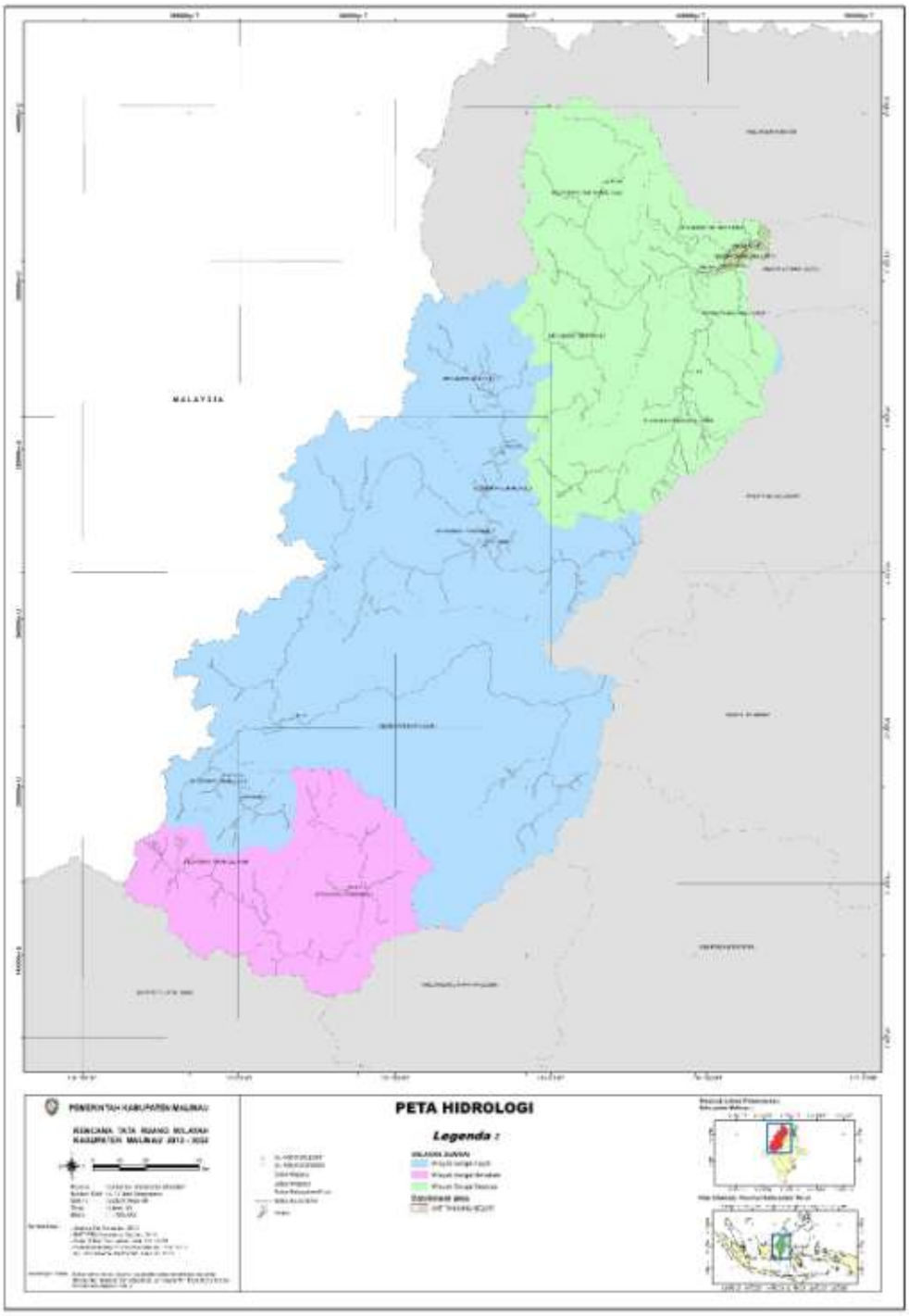

Gambar 2. 6Peta Hidrologi Kabupaten Malinau
Sumber RTRW Kabupaten Malinau 2012-2023

Berdasarkan kondisi hidrologinya sungai – sungai utama di Kabupaten Malinau terdiri dari : Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Mentarang, Sungai Bahau , Sungai Kayan yang menyebar pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sesayap , DAS Kayan , DAS Mahakam, DAS Sembakung dan DAS Berau. Sekitar 37.84 % Wilayah Kabupaten Malinau merupakan dataran tinggi (> 900

dpl) dan menjadi hulu beberapa sungai besar maupun kecil yang mengalir ke berbagai Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Sungai tepanjang di Kabupaten Malinau antara lain Sungai Bahau (622 Km), Sungai Kayan (576 Km), Sungai Pengenau (242 Km) dan Sungai Mentarang (176 Km). Kelebihan-kelebihan yang menonjol dari air bawah tanah terhadap permukaan, antara lain adalah bahwa air bawah tanah terdapat pada reservoir yang tersebar luas, tetapi tidak menyita tempat, tidak memerlukan jaringan penyaluran, cadangannya tidak berkurang karena penguapan, bebas dari bahaya banjir, bebas polusi bakteri, suhunya stabil, dan aman dari pencemaran termasuk pencemaran radioaktif. Pemanfaatan air bawah tanah yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan akan menimbulkan berbagai akibat yang merusak, seperti penurunan muka pisometrik air tanah sehingga akan menyebabkan debit air berkurang, pompa selam tidak berfungsi, dan dapat pula diikuti dengan penyusupan air laut ke daratan yang dapat merusak pondasi bangunan dan mencemari air bawah tanah itu sendiri.

7. Bentuk Lahan dan Tutupan Lahan

Berdasarkan Peta Bentuk Lahan Ekoregion Kalimantan yang di*publish* oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan tahun 2016, dapat diketahui bahwa Kabupaten Malinau memiliki dominasi bentuk lahan Pegunungan Struktural Lipatan, yang memiliki elevasi > 500 m. Karakter lainnya, bentuk lahan pegunungan ini adalah lebih didominasi oleh kemiringan lereng yang terjal hingga sangat terjal. Keberadaan Pegunungan Struktural Lipatan mengindikasikan bahwa Kabupaten Malinau memiliki kawasan yang sangat potensial sebagai daerah resapan air. Selain itu, daerah Pegunungan Struktural Lipatan ini dicirikan oleh kekayaan flora dan fauna endemik serta tumbuhan epifit.

Bentuk lahan lain yang cukup mendominasi wilayah ini adalah Perbukitan Struktural Lipatan yang umumnya memiliki elevasi < 500 m. Ciri penting perbukitan struktural lipatan ini

adalah polanya yang memanjang, dimana bentuk lahan ini biasanya selalu berdampingan dengan bentuk lahan Lembah Struktural Lipatan sebagai hasil proses denudasional batuan sedimen yang menyusunnya. Daerah perbukitan struktural lipatan ini merupakan daerah potensial sebagai daerah resapan air. Selain itu, daerah ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, karena kaya akan flora dan fauna. Sebagai contoh adalah jenis Meranti dan Kruing yang banyak ditemukan di wilayah ini.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peta Tutupan Lahan Ekoregion Kalimantan yang dipublis oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan tahun 2016, diketahui bahwa tutupan lahan Kabupaten Malinau lebih didominasi oleh tutupan lahan Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder. Dimana di beberapa lokasi juga ditemui adanya tutupan lahan berupa semak belukar. Di satu sisi, dominasi tutupan lahan Kabupaten Malinau ini mengindikasikan kemampuan yang tinggi kawasan ini sebagai kawasan pengatur air, udara dan iklim serta memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, namun di sisi yang lain kondisi tutupan lahan tersebut mencerminkan telah terjadi degradasi dan kerusakan hutan yang dapat berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup di wilayah ini.

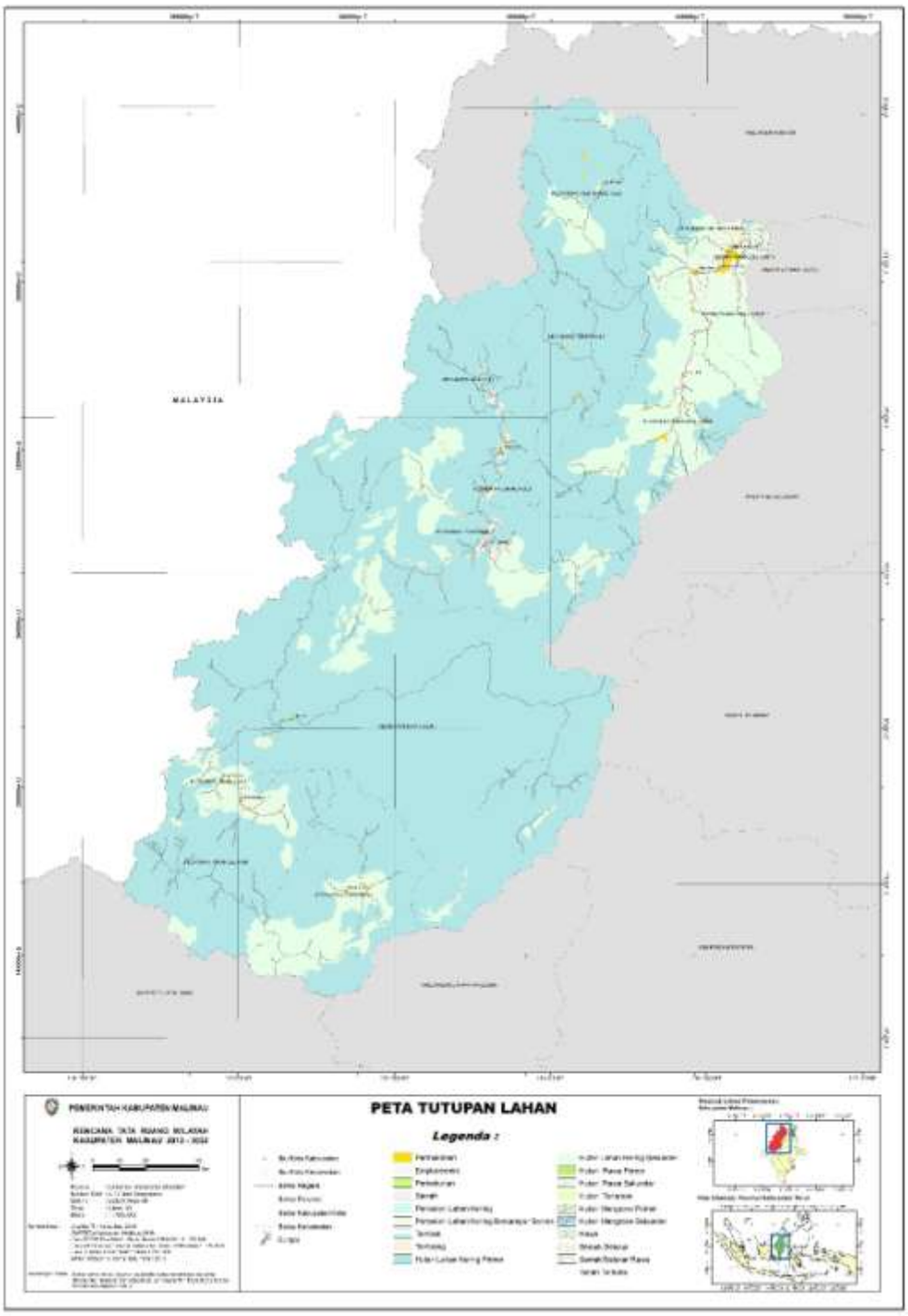

Gambar 2. 7Peta Tutupan Lahan Kabupaten Malinau
Sumber RTRW Kabupaten Malinau 2012-2023

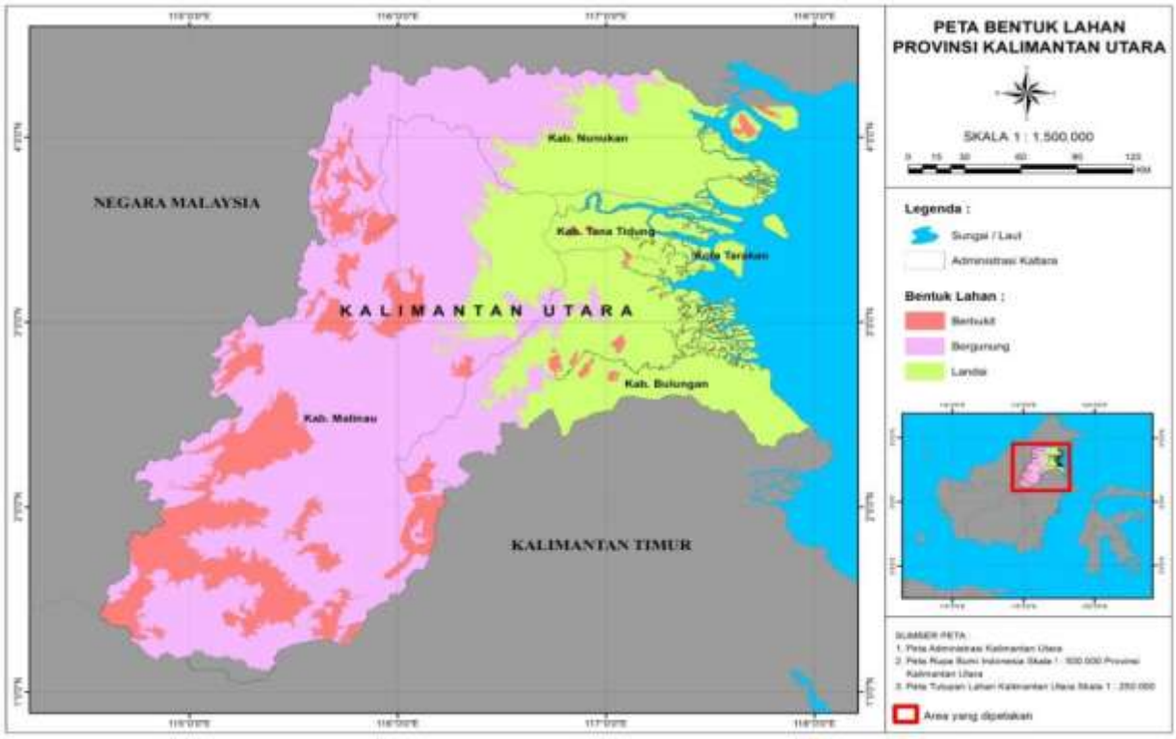

Gambar 2. 8Peta Bentuk Lahan Ekoregion Kalimantan
Sumber: Overlay Peta Administrasi, Rupa Bumi Indonesia dan Tutupan Lahan Kaltara (2020)

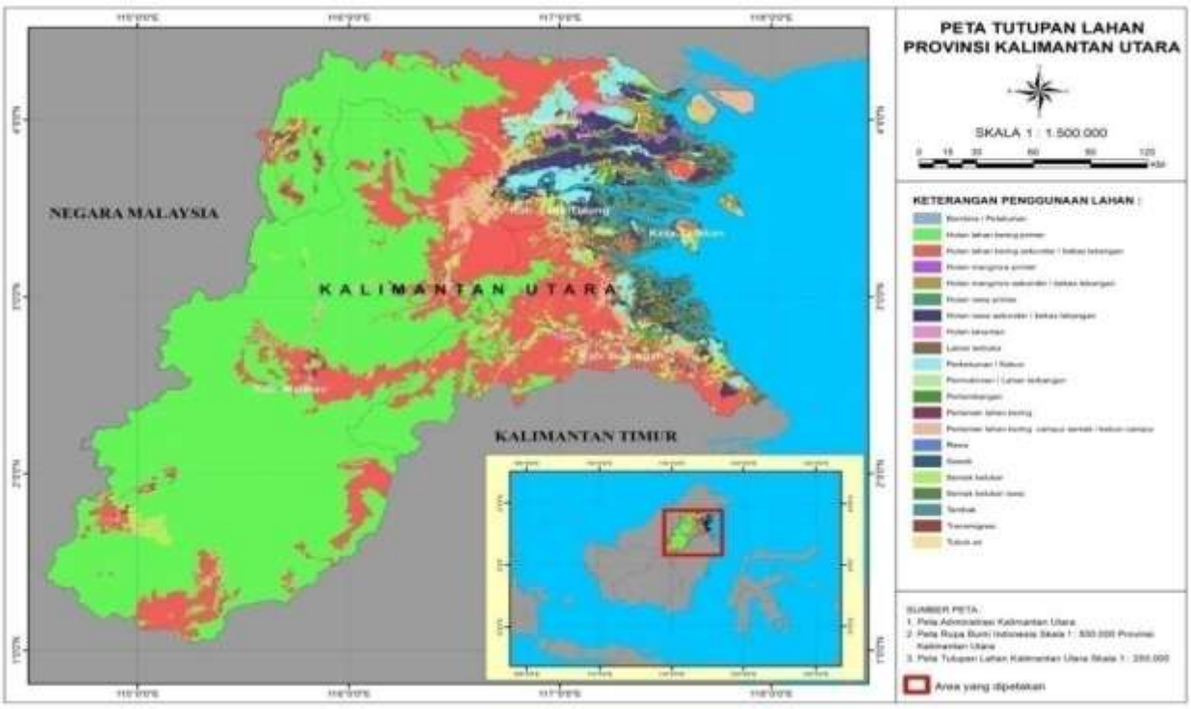

Gambar 2. 9Peta Tutupan Lahan Ekoregion Kalimantan
Sumber: Overlay Peta Administrasi, Rupa Bumi Indonesia Tutupan Lahan Kaltara (2020)

8. Pola Ruang Wilayah Kabupaten

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung dalam rencana pola ruang wilayah Kabupaten Malinau memiliki luas kurang lebih 1.658.957 Ha yang terdiri dari :

a. kawasan hutan lindung;

Kawasan hutan lindung yang ditetapkan seluas kurang lebih 672.572 Ha, meliputi :

i. kawasan hutan lindung Pasilan Tabah - Hulu Sungai Sembakung terletak di Kecamatan Malinau Utara, Mentarang Hulu dan Mentarang dengan luas sekitar 153.370 Ha;
ii. kawasan hutan lindung Long Ketrok terletak di Kecamatan Malinau Selatan dan Mentarang dengan luas sekitar 43.636 Ha;
iii. kawasan hutan lindung Gunung Laung - Gunung Belayan terletak di Kecamatan Mentarang, Bahau Hulu dan Pujungan dengan luas sekitar 169.000 Ha
iv. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan - Hilir Sungai Bahau terletak di Kecamatan Pujungan dan Kayan Hilir dengan luas sekitar 34.056 Ha;
v. kawasan hutan lindung Gunung Kopol - Gunung Jamik terletak di Kecamatan Kayan Hilir dengan luas sekitar 32.149 Ha;
vi. kawasan hutan lindung Kayaniot terletak di Kecamatan Kayan Hilir dengan luas sekitar 48.250 Ha;
vii. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Laham terletak di Kecamatan Kayan Hilir dan Sungai Boh dengan luas sekitar 65.276 Ha;
viii. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Langan terletak di Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Selatan dan Sungai Boh dengan luas sekitar 47.282 Ha;

ix. kawasan hutan lindung Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Pangean terletak di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Selatan dengan luas sekitar 64.568 Ha;

2) kawasan hutan lindung Hulu Sungai Tekwai terletak di Kecamatan Kayan Selatan dengan luas sekitar 14.985 Ha; dan

3) kawasan hutan lindung lainnya meliputi :

i. kawasan hutan penelitian Lalut Birai di Long Alango Kecamatan Bahau Hulu dengan luas kurang lebih 6.000 Ha;

ii. kawasan hutan lindung tradisional Tana Ulen di Setulang Kecamatan Malinau Selatan dengan luas kurang lebih 5.300 Ha; dan

iii. kawasan hutan penelitian/arboretum KM. 8 Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat dengan luas kurang lebih 225 Ha.

b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Bagi Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang berupa resapan air terdiri atas :

1) kawasan hutan Pasilan Tabah – Hulu Sungai Sembakung;
2) kawasan hutan Long Ketrok;
3) kawasan hutan Gunung Laung – Gunung Belayan;
4) kawasan hutan Kayaniot;
5) kawasan hutan Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Laham;
6) kawasan hutan Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Langan; dan g. kawasan hutan Hulu Sungai Kayan - Hulu Sungai Pangean.

c. kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan terdiri atas :

1) kawasan sempadan sungai, yang terdapat pada setiap permukiman yang terletak di sepanjang aliran sungai

besar maupun sungai kecil di seluruh kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. 50 (lima puluh) meter untuk sungai kecil di luar kawasan permukiman;
ii. 100 (seratus) meter untuk sungai besar diluar kawasan permukiman; dan
iii. jarak sempadan sungai pada kawasan permukiman akan diatur tersendiri dalam rencana rinci kawasan yang dilengkapi dengan rencana zonasi kawasan

2) kawasan mata air, yang terdapat di Long Alango, Long Pujungan, Data Dian, Long Ampung, Long Berang, Sempayang, Taras, dan Setulang;
3) RTH pada kawasan ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan desa akan direncanakan sebagai berikut:

i. pada kawasan ibukota kabupaten dan disetiap ibukota kecamatan, ruang terbuka hijau akan dipertahankan minimal 30% dari luas kawasan terbangun dengan komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat;
ii. kawasan persawahan yang terletak disekitar kawasan ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan akan tetap dipertahankan sebagai RTH dan difungsikan sebagai lahan pangan berkelanjutan;
iii. pada kawasan perdesaan RTH akan dipertahankan minimal 40% dari luas kawasan terbangun, dengan komposisi 20% RTH publik dan 20% RTH privat;
iv. ketentuan lebih lanjut kawasan RTH akan diatur tersendiri yang perencanaannya diintegrasikan dengan rencana jaringan prasarana dan sarana perkotaan/perdesaan yang dilengkapi dengan rencana zonasi kawasan.

d. Kawasan Suaka Alam, Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan berada di Taman Nasional Kayan Mentarang

(TNKM) yang terletak di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terdapat di Kabupaten Malinau memiliki luas kurang lebih 986.385 Ha dan terletak membentang dari Kecamatan Mentarang Hulu, kecamatan Mentarang, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Pujungan dan Kecamatan Kayan Hilir. Sedangkan dalam pengelolaan taman nasional kayan mentarang meliputi :

1) perencanaan kawasan, batas dan zonasi;
2) pengelolaan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya;
3) pemanfaatan TNKM;
4) penelitian dan pengembangan;
5) perlindungan dan pengelolaan sumber daya TNKM;
6) pengembangan kelembagaan;
7) koordinasi;
8) pengembangan sarana dan infrastruktur;
9) pengembangan peran serta masyarakat;
10) monitoring dan evaluasi; dan
11) pendanaan.

e. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Dalam dokumen RTRW kabupaten malinau Kawasan rawan bencana alam terdiri atas: kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan. kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi, kawasan yang terletak disepanjang aliran Sungai yang rawan terhadap longsornya tebing sungai, meliputi: Malinau Seberang, Respen Tubu, Malinau Hilir, Malinau Kota, Malinau Hulu, Kuala Lapang, Tanjung Lapang, Taras, Lidung Kemenci, Pulau Sapi, Long Pujungan dan Long Nawang. Sedangkan kawasan disekitar gunung atau perbukitan curam yang rawan terhadap terjadinya longsor, meliputi: Data Dian, Long Berang, Sempayang dan Long Loreh, kemudian kawasan rawan bencana banjir meliputi permukiman di sepanjang aliran Sungai Sesayap, Sungai Mentarang, Sungai Malinau, Sungai Kayan, Sungai Bahau dan Sungai

Pujungan dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Malinau dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan meliputi kawasan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan karena kandungan batubara maupun aktifitas budi daya masyarakat dan atau pembalakan hutan yang lokasinya menyebar secara acak berbentuk spot-spot pada kawasan hutan, yang terdapat di:

1) Kecamatan Malinau Kota;
2) Kecamatan Malinau Barat;
3) Kecamatan Malinau Utara;
4) Kecamatan Malinau Selatan;
5) Kecamatan Mentarang;
6) Kecamatan Pujungan;
7) Kecamatan Kayan Hulu;
8) Kecamatan Kayan Hilir;
9) Kecamatan Kayan Selatan;

Kabupaten Malinau mempunyai potensi bencana hidrometeorologi khususnya bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan dengan level sedang. Hal ini dapat di sajikan dalam tabel di bawah ini.

Nilai Indeks Risiko Provinsi Kalimantan Utara dari Tahun 2017-2020

NO	KABUPATEN	2017	2018	2019	2020	KELAS RISIKO 2020
1.	Malinau	124,40	124,40	124,40	124,40	SEDANG

Sumber : RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026

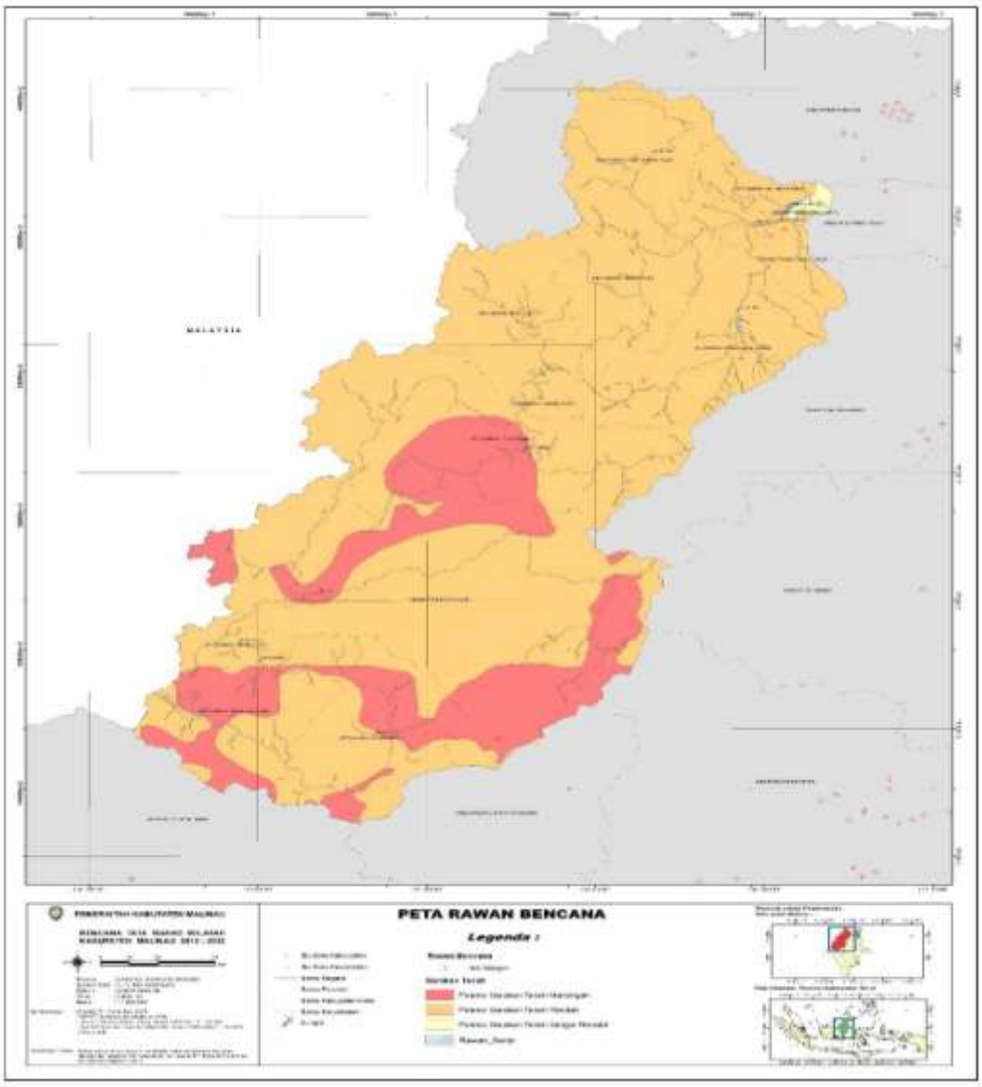

Gambar 2. 10 Peta Rawan Bencana Kabupaten Malinau

Sumber : RTRW Kabupaten Malinau 2012-2032

2) Kawasan Budidaya

Kawasan budi daya merupakan ruang wilayah kabupaten di luar kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya terdiri atas (a) Kawasan Budi daya Kehutanan dengan luas kurang lebih 1.969.640 Ha dan (b) Kawasan Budi daya Non Kehutanan atau Areal Penggunaan Lain dengan luas kurang lebih 335.522 Ha. Rencana pengelolaan kawasan budi daya meliputi (a) kawasan peruntukan hutan produksi, (b) kawasan peruntukan hutan rakyat, (c) kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan, (d) kawasan peruntukan perikanan, (e) kawasan peruntukan sumber daya air, (f) kawasan peruntukan pertambangan, (g)

kawasan peruntukan permukiman, (h) kawasan peruntukan industri, (I) kawasan peruntukan pariwisata, dan (j) kawasan peruntukan lain. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas (a) Hutan Produksi Tetap (HP), (b) Hutan Produksi Terbatas (HPT), (c) Hutan Produksi Dapat Dikonversi (HPK). Hutan Produksi Tetap dengan luas kurang lebih 367.368 Ha terdapat di Kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Selatan, dan Kecamatan Kayan Hilir. Hutan Produksi Terbatas luas kurang lebih 1.570.817 Ha terdapat di Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan, Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh, dan Hutan Produksi Dapat Dikonversi dengan luas kurang lebih 31.454 Ha terdapat di Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Barat, Malinau Kota, Malinau Utara, dan Kecamatan Mentarang. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan berhutan diluar kawasan budi daya kehutanan dan kawasan lindung yang terletak disekitar permukiman dan atau lahan pertanian masyarakat yang keberadaannya dipertahankan oleh masyarakat dan dikelola secara tradisional dengan kearifan budaya lokal dengan pemanfaatan terbatas hanya untuk keperluan-keperluan masyarakat setempat.

Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dimiliki dan atau dikuasai secara perorangan maupun kolektif, yang struktur dan komposisi hutannya dapat berasal dari hutan alam yang dipertahankan keberadaannya, tanaman penghijauan atau reboisasi, tanaman buah-buahan lokal maupun hutan campuran. Kawasan hutan rakyat terdapat diseluruh wilayah perdesaan dengan pola sebaran berpencar disekitar kawasan budi daya pertanian maupun permukiman masyarakat. Kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan rakyat diatur menurut peraturan yang berlaku dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur budidaya lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan.

Kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi (a) kawasan pertanian tanaman pangan, (b) kawasan pertanian hortikultura dan palawija, (c) kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas (a) kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan dan (b) kawasan peruntukan lahan cadangan. Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan meliputi kawasan persawahan beririgasi maupun belum beririgasi dan kawasan lainnya yang terletak didalam kawasan pertanian yang potensial untuk dikembangkan sebagai lahan persawahan dan program pengembangan pangan lainnya. Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan dikembangkan di Kaliamok, Respen Tubu, Lubak Manis, Putat, Malinau Seberang/Kabiran, Pulau Sapi, Lidung Kemenci, Mentarang Baru, Malinau Hilir, Batu Lidung, Tanjung Lapang, Taras Seberang, Sempayang Seberang, Long Ampung dan Long Alango dengan luas kurang lebih 7.292 Ha. Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam rencana detail kawasan yang dilengkapi zonasi kawasan dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Kawasan peruntukan lahan cadangan adalah kawasan pertanian lahan kering yang diperuntukan sebagai pencadangan lahan pertanian dan termasuk didalamnya adalah lahan pertanian tradisional gilir balik yang terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 17.334 Ha. Kawasan pertanian hortikultura dan palawija terdapat di seluruh wilayah kecamatan yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat secara tersebar dalam skala kecil dengan jenis tanaman budidaya berupa buah-buahan, sayuran dan kacang-kacangan dengan luas kurang lebih 500 Ha. Kawasan perkebunan diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Selatan, Mentarang, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Kayan Selatan dengan komoditas utama: kopi, kakao, sawit, dan karet dengan luas kurang lebih 301.355 Ha.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Pertanian dan Perkebunan

Kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi (a) kawasan pertanian tanaman pangan, (b) kawasan pertanian hortikultura dan palawija, (c) kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas (a) kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan dan (b) kawasan peruntukan lahan cadangan. Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan meliputi kawasan persawahan beririgasi maupun belum beririgasi dan kawasan lainnya yang terletak didalam kawasan pertanian yang potensial untuk dikembangkan sebagai lahan persawahan dan program pengembangan pangan lainnya. Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan dikembangkan di Kaliamok, Respen Tubu, Lubak Manis, Putat, Malinau Seberang/Kabiran, Pulau Sapi, Lidung Kemenci, Mentarang Baru, Malinau Hilir, Batu Lidung, Tanjung Lapang, Taras Seberang, Sempayang Seberang, Long Ampung dan Long Alango dengan luas kurang lebih 7.292 Ha. Kawasan peruntukan lahan pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam rencana detail kawasan yang dilengkapi zonasi kawasan dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Kawasan peruntukan lahan cadangan adalah kawasan pertanian lahan kering yang diperuntukan sebagai pencadangan lahan pertanian dan termasuk didalamnya adalah lahan pertanian tradisional gilir balik yang terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 17.334 Ha. Kawasan pertanian hortikultura dan palawija terdapat di seluruh wilayah kecamatan yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat secara tersebar dalam skala kecil dengan jenis tanaman budidaya berupa buah-buahan, sayuran dan kacang-kacangan dengan luas kurang lebih 500 Ha. Kawasan perkebunan diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Selatan, Mentarang, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Kayan Selatan dengan komoditas utama: kopi, kakau, sawit, dan karet dengan luas kurang lebih 301.355 Ha

2. Perikanan

Kawasan perikanan terdiri atas (a) perikanan tangkap, (b) budi daya perikanan dan (c) pengolahan ikan. Perikanan tangkap adalah kegiatan perikanan tangkap diperairan umum yang terdapat pada sungai-sungai besar dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Malinau. Budi daya perikanan terdiri atas (a) kawasan budi daya perikanan darat (kolam), yang diprioritaskan dikembangkan di daerah yang tersedia pasokan air yang cukup dan diarahkan ke kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, dan Kecamatan Mentarang, (b) pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kaliamok Kecamatan Malinau Utara, (c) pengembangan kawasan minapolitan di Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara dengan luas kurang lebih 112 Ha, (d) pembangunan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara, Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan, dan Lidung Kemenci di Kecamatan Mentarang, (e) penyediaan pakan ikan yang tergabung dalam unit pabrik pakan ternak di Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota dengan luas kurang lebih 1 Ha, Pengolahan ikan diarahkan kepada industri pengolahan rumah tangga untuk mempertahankan mutu ikan dan meningkatkan harga jual.

3. Kehutanan

Kawasan budi daya merupakan ruang wilayah kabupaten di luar kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya terdiri atas (a) Kawasan Budi daya Kehutanan dengan luas kurang lebih 1.969.640 Ha dan (b) Kawasan Budi daya Non Kehutanan atau Areal Penggunaan Lain dengan luas kurang lebih 335.522 Ha. Rencana pengelolaan kawasan budi daya meliputi (a) kawasan peruntukan hutan produksi, (b) kawasan peruntukan hutan rakyat, (c) kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan, (d) kawasan peruntukan perikanan, (e) kawasan peruntukan

sumber daya air, (f) kawasan peruntukan pertambangan, (g) kawasan peruntukan permukiman, (h) kawasan peruntukan industri, (I) kawasan peruntukan pariwisata, dan (j) kawasan peruntukan lain. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas (a) Hutan Produksi Tetap (HP), (b) Hutan Produksi Terbatas (HPT), (c) Hutan Produksi Dapat Dikonversi (HPK). Hutan Produksi Tetap dengan luas kurang lebih 367.368 Ha terdapat di Kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Selatan, dan Kecamatan Kayan Hilir. Hutan Produksi Terbatas luas kurang lebih 1.570.817 Ha terdapat di Kecamatan Mentarang Hulu, Mentarang, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan, Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh, dan Hutan Produksi Dapat Dikonversi dengan luas kurang lebih 31.454 Ha terdapat di Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Barat, Malinau Kota, Malinau Utara, dan Kecamatan Mentarang. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan berhutan diluar kawasan budi daya kehutanan dan kawasan lindung yang terletak disekitar permukiman dan atau lahan pertanian masyarakat yang keberadaannya dipertahankan oleh masyarakat dan dikelola secara tradisional dengan kearifan budaya lokal dengan pemanfaatan terbatas hanya untuk keperluan-keperluan masyarakat setempat. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dimiliki dan atau dikuasai secara perorangan maupun kolektif, yang struktur dan komposisi hutannya dapat berasal dari hutan alam yang dipertahankan keberadaannya, tanaman penghijauan atau reboisasi, tanaman buah-buahan lokal maupun hutan campuran. Kawasan hutan rakyat terdapat diseluruh wilayah perdesaan dengan pola sebaran berpencar disekitar kawasan budi daya pertanian maupun permukiman masyarakat. Kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan rakyat diatur menurut peraturan yang berlaku dengan tetap menjaga dan

melestarikan nilai-nilai luhur budidaya lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan.

4. Energi dan Pertambangan

Kawasan peruntukan sumber daya air adalah kawasan perairan umum yang meliputi sungai besar dan sungai kecil yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 12.595 Ha. Rencana pengelolaan sumber daya air meliputi (a) pemanfaatan sumber daya air berupa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air untuk kepentingan sumber air baku, transportasi sungai, pembangkit listrik dan keperluan pertanian serta perikanan dan (b) perlindungan DAS serta pengendalian kegiatan budidaya atau aktifitas masyarakat yang beresiko menurunkan kualitas air sungai. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas (a) kawasan yang memiliki potensi mineral logam jenis emas dan (b) kawasan pertambangan mineral bukan logam eksisting batubara dan bahan galian C. Kawasan yang memiliki potensi mineral logam jenis emas terdapat di Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir dengan luas kurang lebih 51.991 Ha. Kawasan pertambangan mineral bukan logam eksisting batubara dan bahan galian C meliputi (a) pertambangan batubara terdapat di Kecamatan Malinau Selatan dan Kecamatan Malinau Barat dengan luas kurang lebih 29.143 Ha. (b) pertambangan bahan galian C adalah pertambangan skala kecil dengan bahan galian berupa sirtu, batu gunung, batu padas, tanah liat dan bahan urugan lainnya yang lokasinya terdapat diseluruh wilayah kabupaten.

2.1.3. Demografi

Selain dipengaruhi oleh perpindahan penduduk yang masuk (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar), pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Malinau merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Jumlah

penduduk Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Malinau sebanyak 76.606 jiwa, sedangkan pada tahun 2020penduduk Kabupaten Malinau menjadi 82.510 jiwa. Berdasarkan data penduduk, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malinau per tahun adalah sebesar 1,87 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malinau ini lebih tinggi berada di atas pertumbuhan penduduk Indonesia yang sejak tahun 2010 hanya kurang dari 2%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malinau ini juga masih berada di bawah laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Utara yang hanya 2,86 persen di tahun 2020.

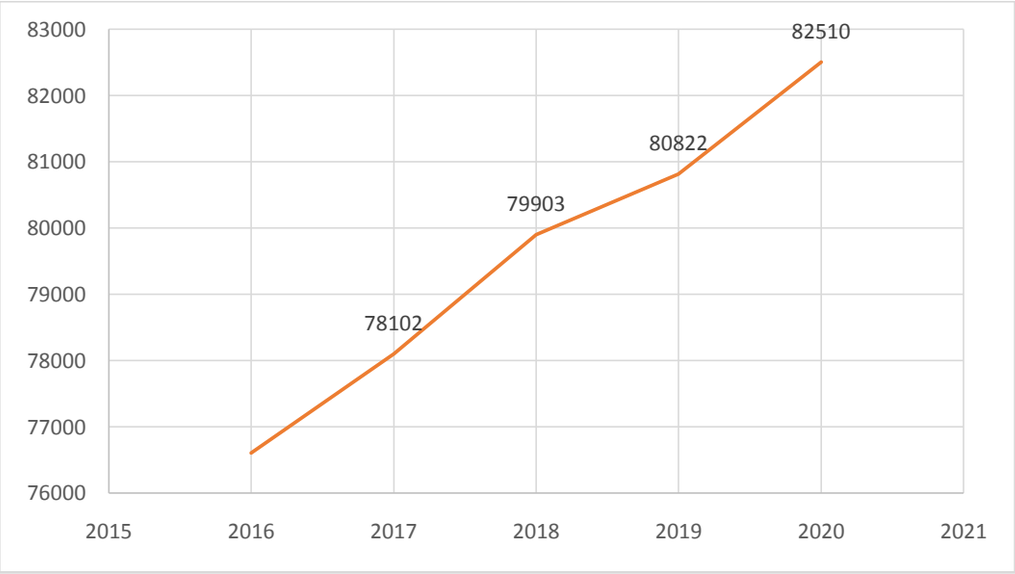

Sumber : Kabupaten Malinau dalam Angka (2020), BPS Kabupaten Malinau 2020

Gambar 2. 11Grafik Jumlah Penduduk (jiwa) Kabupaten Malinau Tahun 2017 – 2020

Jika dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Malinau berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Malinau didominasi oleh penduduk dengan kelompok umur 15-64 tahun. Dimana jumlah penduduk dari kelompok umur 15-64 dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berkisar antara 64%, dengan kecenderungan selalu meningkat setiap tahunnya. Sementara penduduk dengan kelompok umur lebih dari 65 tahun tidak mengalami peningkatan atau penurunan yang berarti (cenderung tetap 3%). Sedangkan penduduk dengan kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) cenderung mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun, meskipun angka peningkatannya tidak signifikan. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Malinau untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, tentu harus diringi dengan program-program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, banyaknya jumlah penduduk pada kelompok umur produktif tersebut menjadi beban dalam hal angkatan kerja, karena jika lapangan pekerjaan tidak tersedia bagi mereka maka yang terjadi kemudian adalah tingginya tingkat pengangguran.

Tabel 2. 4
Komposisi Penduduk Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020
Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Tahun							
	2017		2018		2019		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0 – 14	27.550	33	28.615	33	29.712	33	22.545	27
15 – 64	53.803	64	55.883	64	58.038	64	56.546	69
65 +	2.435	3	2.534	3	2.632	3	3.419	4
Jumlah	**83.788**	**100**	**87.032**	**100**	**90.382**	**100**	**82.510**	**100**

Sumber : Malinau dalam Angka (2019), BPS Kabupaten Malinau 2021

Dari aspek rasio jenis kelamin (*sex ratio*), secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dijelaskan dari rasio jenis kelamin yang nilainya lebih dari 100 sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Namun demikian, rasio jenis kelamin di Kabupaten Malinau telah melampaui standar biologis perbandingan jenis kelamin yakni sebanyak 116-117 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Patut menjadi perhatian di masa mendatang bahwa rasio jenis kelamin yang tinggi, karena beberapa studi sering mengetengahkan bahwa jumlah pria yang lebih banyak di suatu negara dapat memberikan ancaman terhadap keamanan, terutama terkait dengan konflik sosial. Tetapi di Kabupaten Malinau konflik tersebut tidak terjadi, karena yang ketidakseimbangan jenis kelamin antara jumlah laki-laki dan perempuan penduduk Malinau tersebut lebih disebabkan oleh adanya tenaga kerja pendatang yang bekerja di berbagai perusahaan yang ada di wilayah ini, sehingga sifatnya menjadi sangat produktif.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan, Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (jiwa)	83.788	87.032	90.382	82510
- Laki-laki	45.178	46.902	48.727	44053
- Perempuan	38.610	40.130	41.655	38457
Rasio Jenis Kelamin	117	117	117	115
Kepadatan penduduk (jw/km^2)	2,09	2,17	2,25	2,06

Sumber : Kabupaten Malinau dalam Angka (2021)

Kepadatan penduduk Kabupaten Malinau masih sangat rendah karena baru mencapai 2 jiwa/km^2. Namun demikian, dari tahun ke tahun kepadatan penduduk di wilayah ini cenderung mengalami peningkatan. Dalam hal ini terutama yang harus diperhatikan adalah kepadatan penduduk pada ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan yang cenderung lebih pada dibanding dengan penduduk di wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terpencil yang sangat jarang.

Tabel 2. 6
Penduduk, Laju Petumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau. 2010 dan 2020

Kode	Kecamatan	Penduduk	Sebaran penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2020
		2010	2020		
10	Sungai Boh	2.148	2.357	2,90%	0,9
20	Kayan Selatan	1.711	1.982	2,40%	1,43
30	Kayan Hulu	2.535	2.432	2,90%	-0,4
40	Kayan Hilir	1.352	1.484	1,80%	0,91
50	Pujungan	1.800	1.750	2,10%	-0,27
60	Bahau Hilir	1.460	1.406	1,70%	-0,36
70	Sungai Tubu	0	875	1,10%	0
80	Malinau Selatan Hulu	0	2.452	3,00%	0
90	Malinau Selatan	7.999	5.479	6,60%	-3,6
100	Malinau Selatan Hilir	0	2.872	3,50%	0
110	Mentarang	5.291	5.909	7,20%	1,07
120	Mentarang Hulu	756	971	1,20%	2,45
130	Malinau Utara	10.124	14.671	17,80%	3,66
140	Malinau Barat	8.157	11.245	13,60%	3,16
150	Malinau Kota	19.247	26.625	32,30%	3,19
	Malinau	**62.580**	**82.510**	**100%**	**2,71**

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021

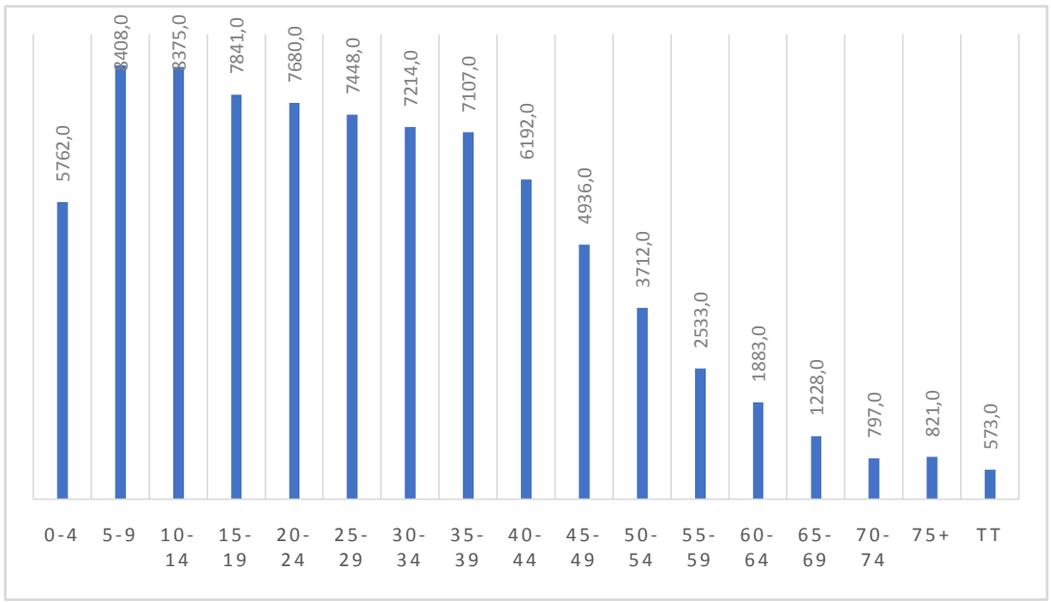

Sumber : Kabupaten Malinau dalam Angka (2020), BPS Kabupaten Malinau 2020

Gambar 2. 12**Grafik Jumlah Penduduk (jiwa) menurut Kelompok UmurKabupaten Malinau Tahun 2020**

Berdasarkan gambar diatas jumlah penduduk, menurut kelompok umur tertinggi pada umur 5 sampai 9 tahun. Namun rata-rata penduduk di Kabupaten Malinau adalah penduduk dengan usia produktif yang memiliki rentang umur 5 sampai 54 tahun.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) merupakan ukuran untuk melihat kualitas dan dampak kinerja pembangunan daerah. Angka IPM suatu daerah mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses atau memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Nilai IPM ini juga dapat mencerminkan perwujudan pembangunan manusia yang baik, dimana ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Selain itu,IPM menentukan peringkat/level pembangunan suatu wilayah dan merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Berdasarkan data yang ada, IPM Kabupaten Malinau cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana nilai IPM

71,23 pada tahun 2017 dan 71,94 pada tahun 2020 (Lihat Tabel 2.7), yang berarti berada pada level tinggi. Kondisi ini tentu merupakan indikasi positif bagi kinerja pembangunan di Kabupaten Malinau. Namun demikian, nilai IPM Kabupaten Malinau masih berada pada nilai batas bawah pada kisaran level IPM tinggi (nilai IPM tinggi = 70≤IPM<80), oleh karenanya IPM Kabupaten Malinau masih harus ditingkatkan, sehingga kesejahteraan masyarakat Malinau ditinjau berdasarkan kemampuannya memperoleh pendapatan, pendidikan dan kesehatan semakin meningkat.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indikator yang digunakan dalam menghitung IPG adalah angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan perkiraan pendapatan. Seluruhnya dibandingkan antara perempuan dan laki-laki. Jika indeks semakin mendekati 100, maka semakin kecil ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Indeks dapat melebihi 100 apabila capaian perempuan lebih tinggi dibanding capaian laki-laki. Berikut adalah Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Malinau.

Tabel 2. 7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
IPM	71,23	71,74	72,06	71,94
IPG	81,02	81,53	81,71	81,36

Sumber : Malinau dalam Angka (2019), BPS Kabupaten Malinau 2021

2.2.2. Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauhmana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi tujuan utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat

menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Indeks gini (koefisien gini) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai indeks gini berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan indeks gini dibagi menjadi 3 kelompok/ kategori, indeks gini lebih dari 0,5 termasuk ke dalam kategori "ketimpangan tinggi", indeks gini antara 0,30-0,49 termasuk kategori "ketimpangan sedang" dan indeks gini kurang dari 0,30 termasuk dalam kategori "ketimpangan rendah".

Indeks Gini Kabupaten Malinau pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang dilihat berdasarkan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara adalah cenderung turun yakni dengan nilai indeks lebih dari 0,3 yang berarti termasuk dalam kategori "ketimpangan sedang", kecuali Indeks Gini tahun 2019 yang menurun menjadi 0,295 yang berarti menjadi kabupaten dengan tingkat "ketimpangan rendah" (Lihat Tabel 2.8). Meskipun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Malinau saat ini termasuk dalam kategori rendah, namun nilai indeks gininya masih berada di batas terbawah ketimpangan rendah (selisih 0,005 dengan nilai ketimpangan sedang). Hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga ketimpangan tersebut semakin dapat diturunkan.

Tabel 2. 8
Indeks Gini Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Indeks Gini	0,311	0,304	0,295	0,289

Sumbe : BPS Provinsi Kaltara (2021)

2.2.3. Kemiskinan

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malinau cenderung fluktuatif.Persentase dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017ke tahun 2020mengalami penurunan. Hal yang

menggembirakan adalah bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Malinau berada di bawah persentase penduduk miskin nasional (9,82% pada tahun 2018 dan 9,22% sampai bulan September 2019). Namun, jumlah penduduk miskin sebanyak lebih dari 6.000 jiwa yang ada di Kabupaten Malinau adalah penting untuk menjadi perhatian, karena penduduk miskin merupakan persoalan sosial yang tersendiri yang keberadaannya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian. Dalam hal ini kondisi keterisolasian merupakan penyebab yang patut menjadi perhatian khusus di Kabupaten Malinau.

Tabel 2. 9
Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,06	7,68	6,96	6,63
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	6,69	6,63	6,23	6,16

Sumber : BPS Kabupaten Malinau 2021

2.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Malinau adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, yang mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Malinau. Dengan demikian, semakin tinggi TPAK Kabupaten Malinau, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berdasarkan Tabel 2.10 dapat diketahui bahwa TPAK Kabupaten Malinau dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan, yakni 66,44 persen di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Malinau terdapat 75 penduduk yang potensial untuk mengisi lapangan kerja. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi hanya 66 penduduk penduduk per 100 perduduk. Dengan demikian TPAK Kabupaten Malinau masih cenderung fluktuatif.

Tabel 2. 10

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
TPAK (%)	71,88	75,29	68,86	66,44

Sumber : Malinau dalam Angka (2019), BPS Kabupaten Malinau 2021

2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Malinau memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Pertambahan penduduk usia kerja yang tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai memberikan dampak peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Malinau. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Malinau cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan pesentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Malinau berada di bawah tingkat pengangguran terbuka tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional. Hal ini membuktikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha. Namun persoalan pengangguran tetap harus diperhatikan karena persoalan ini merupakan persoalan sosial yang memiliki kepekaan tinggi.

Tabel 2. 11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,01	4,28	4,13	5,08

Sumber : Malinau dalam Angka (2019), BPS Kabupaten Malinau 2021

2.2.6. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau merupakan salah satu gambaran kinerja perekonomian daerah Kabupaten Malinau. Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.12 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau cukup berfluktuatif, dimana tahun 2020 merupakan tahun dengan pertumbuhan yang terendah (-0,62%), tahun 2017 mengalami kenaikan (5,99%), 2018 kembali mengalami penurunan (5,74%) dan naik (6,34%) di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau di tahun 2019 ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara

(6,91%). Kondisi tidak stabilnya atau berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau ini harus menjadi perhatian di masa mendatang dikarenakan masih pandemik Covid-19.

Tabel 2. 12
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,99	5,74	6,34	-0,62

Sumber : Malinau dalam Angka (2019), BPS Kabupaten Malinau 2021

2.2.7. PDRB Perkapita

Pengukuran kinerja ekonomi Kabupaten Malinau dapat juga diukur dengan menggunakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita, dimana PDRB per kapita diperoleh dari pembagian PDRB dengan jumlah penduduk Kabupaten Malinau. Pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan berdasarkan aktifitas produksi barang/jasa, nilai PDRB perkapita khususnya dapat menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

PDRB perkapita Kabupaten Malinau tahun 2017–2020 cenderung mengalami peningkatan (Lihat Tabel 2.13 dan 2.14), dan PDRB perkapita Malinau berada jauh di atas PDRB perkapita nasional (Rp 59,1 juta tahun 2019). Hal berarti bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau secara rata-rata dilihat dari sisi pendapatannya.

Tabel 2. 13
Perkembangan PDRB Kabupaten Malinau (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.033,62	1.076,08	1.170,12	1276,93
Pertambangan dan Penggalian	4.151,54	4.618,15	5.332,72	5406,99
Industri Pengolahan	243,39	259,02	275,89	287,07
Pengadaan Listrik dan Gas	2,96	3,26	3,87	4,48
Pengadaan Air,	5,72	6,33	7,17	8,54

Lapangan Usaha	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang				
Konstruksi	1.317,04	1.462,40	1.714,23	1925,3
Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	341,69	386,47	444,15	492,03
Transportasi dan Pergudangan	260,46	300,68	336,93	346,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145,02	171,92	195	204,17
Informasi dan Komunikasi	26,91	30,49	34,95	40,46
Jasa Keuangan	18,39	21,07	22,82	24,57
Real Estate	19,86	22,19	24,67	26,19
Jasa Perusahaan	13,31	14,31	15,94	17,35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	606,31	649,1	696,92	712,51
Jasa Pendidikan	196,46	216	238,13	257,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,39	120,63	135,65	159,03
Jasa Lainnya	5,9	6,7	7,55	8,96
PDRB Malinau	**8.496,97**	**9.364,80**	**10.656,71**	**11.198,02**

Sumber : Malinau dalam Angka (2019), BPS Kabupaten Malinau 2021

Tabel 2. 14
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
PDRB Per Kapita (Rp) *)	101.410.345,20	107.555.726,60	117.789.604,10	135.720.000,00

*Keterangan: *) Dihitung berdasarkan PDRB (Tabel 2.13) dan Jumlah Penduduk (Gambar2.4)*

2.2.8. Laju Inflasi

Merujuk pada inflasi Kota Tarakan karena Kabupaten Malinau belum melaksanakan perhitungan inflasi maka laju inflasi di Kabupaten Malinau menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Malinau cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, laju inflasi Kabupaten Malinau sebesar 5,00 persen, sedangkan tingkat inflasi Kabupaten Malinau pada tahun 2019 sebesar 1,47 persen (Lihat Tabel 2.15). Dengan

demikian dapat dinyatakan bahwa inflasi di Kabupaten Malinau tergolong inflasi ringan karena laju inflasi dan tingkat infllasi di bawah 10%. Inflasi di Kabupaten Malinau lebih cenderung disebabkan oleh sumber-sumber domestik seperti meningkatnya harga barang dan jasa permintaan masyarakat yang tinggi, suplai yang terkadang mengalami gangguan/ terbatas dan biaya produksi yang mengalami kenaikan.

Tabel 2. 15
Laju Inflasi Kabupaten Malinau 2018-2019 Berdasarkan Laju Inflasi Kota Tarakan

Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2018-2020									
Bulan	**Tahun**								
	2018			2019			2020		
	Inflasi Bulanan	Tahun Kalender	Tahun ke Tahun	Inflasi Bulanan	Tahun Kalender	Tahun ke Tahun	Inflasi Bulanan	Tahun Kalender	Tahun ke Tahun
Januari	0,49	0,49	2,57	0,96	0,96	5,49	-0,07	-0,07	0,01
Februari	0,09	0,58	2,62	-0,03	0,94	5,38	-0,25	-0,33	0,00
Maret	-0,03	0,55	2,18	-0,63	0,3	4,74	-0,46	-0,79	-0,46
April	0,29	0,84	2,2	0,6	0,9	5,06	0,2	-0,59	0,13
Mei	0,5	1,35	2,2	0,77	1,67	5,33	-0,27	-0,86	-0,10
Juni	2,71	4,1	3,02	0,53	2,21	3,1	0,99	0,13	0,88
Juli	-1,4	2,64	1,87	-0,64	1,56	3,89	0,24	0,37	0,13
Agustus	0,62	3,28	3,33	-0,92	0,62	2,3	0,35	0,72	0,17
September	-0,73	2,53	2,82	-0,57	0,05	2,46	0,63	1,36	0,54
Oktober	0,03	2,56	3,27	-0,3	-0,25	2,12	-0,28	1,07	-0,21
November	0,76	3,35	4,25	0,63	0,37	1,98	-0,05	1,02	0,09
Desember	1,6	5	5	1,09	1,47	1,47	0,13	1,15	0,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan 2021, BPS Kabupaten Malinau 2020

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan hal penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah. Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai tersebut bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikannya yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahateraan masyarakat tersebut.

Dalam menilai dan mengevaluasi peningkatan kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dapat mengggunakan berbagai kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah. Indikator kinerja bidang pendidikan tersebut antara lain adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Kasar (APK),Angka Partisipasi Murni (APM), angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan data APS pendidikan Kabupaten Malinau diketahui kecenderungan APS yang sifatnya fluktuatif. Demikian halnya dengan APK dan APM.

APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Dimana, semakin tinggi APS semakin tinggi pula penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa di Kabupaten Malinau masih ditemukan penduduk usia sekolah yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan, baik pada pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah dan terlebih pada tingkat menengah atas (Lihat Tabel 2.16).

Selanjutnya, APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengeyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya, dimana APK ini merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Oleh karena persentasenya dapat mencapai lebih dari 100%, maka didalamnya terdapat penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, walaupun usianya telah melebihi. Hal ini terjadi pula di Kabupaten Malinau, dimana terdapat 4 – 7% penduduk yang tidak berusia antara 7 – 12 th yang bersekolah di Sekolah Dasar dan terdapat 2 – 4% penduduk yang tidak berusia 13 – 15 th yang bersekolah di Sekolah Menengah (Lihat Tabel 2.16).

Sementara itu, APM merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada

jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Dengan demikian APM mengukur proporsi anak yang sekolah tepat waktu. Berdasarkan penyataan tersebut dapat diketahui bahwa di Kabupaten Malinau masih terdapat penduduk yang tidak sekolah secara tepat waktu, dengan kecenderungan semakin tinggi jenjang sekolah semakin rendah nilai APM-nya. Hal ini berarti bahwa penduduk Kabupaten Malinau cenderung semakin tidak tepat waktu sekolahnya pada jenjang sekolah yang semakin tinggi (Lihat Tabel 2.16).

Selain yang telah dikemukakan di atas, mengingat Kabupaten Malinau adalah Kabupaten yang berada di wilayah perbatasan, maka pendidikan di wilayah perbatasan yang cenderung masih tertinggal merupakan permasalahan yang harus diselesaikan di masa mendatang. Hal ini sangat terkait dengan upaya melakukan pemerataan pendidikan dalam rangaka peningkatan kualitas SDM unggul daerah.

Tabel 2. 16
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

No	URAIAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1)	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**				
	PAUD				57,58
	SD/MI/sedrajat (%)	108,55	108,59	110,13	108,31
	SMP/MTs/sederajat (%)	93,42	95,25	100,02	102
	SMA/SMK/MA (%)	86,5	88,49	94,39	95,63
2)	**Angka Partisipasi Murni (APM)**				
	SD/MI/sedrajat (%)	92,62	91,05	87,14	94,26
	SMP/MTs/sederajat (%)	80,33	81,13	71,37	72,8
	SMA/SMK/MA (%)	65,46	67,24	n.a	66,73
3)	**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**				
	SD/MI ke SMP/MTs (%)	99,47	98,81	99,8	88,52
	SMP/MTs ke	94,61	95,85	115,92	71,72
	SMA/SMK/MA (%)	81,52	81,05	80,78	385
4)	**Angka Siswa Putus Sekolah**				
	SD/MI/sedrajat (%)	33	7	9	0,42
	SMP/MTs/sederajat (%)	3	16	11	2,43
	SMA/SMK/MA (org)	17	13	13	0
5)	**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah**				
	SD/MI/sedrajat (%)	95,52	95,98	100,85	n.a

No	URAIAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
	SMP/MTs/sederajat (%)	95,52	95,98	100,85	n.a
	SMA/SMK/MA (%)	56,55	52,81	53,46	n.a
6)	**Rasio Guru/Murid**				
	SD/MI/sedrajat (%)	10,08	9,53	9,73	n.a
	SMP/MTs/sederajat (%)	10,08	9,53	9,73	n.a
	SMA/SMK/MA (%)	10	9,83	9,39	n.a
7)	**Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata**				
	SD/MI/sedrajat (%)	n.a	n.a	14.28	n.a
	SMP/MTs/sederajat (%)	n.a	n.a	24.26	n.a
	SMA/SMK/MA (%)	n.a	n.a	n.a	n.a
8)	**Rasio Guru Per Sekolah**				
	SD/MI/sedrajat (%)	n.a	10	9.76	n.a
	SMP/MTs/sederajat (%)	n.a	13,12	121,29	n.a
	SMA/SMK/MA (%)	n.a	16,3	19,17	n.a
9)	**Angka Kelulusan (AL)**				
	SD/MI/sedrajat (%)	n.a	n.a	88.91	102,32
	SMP/MTs/sederajat (%)	n.a	n.a	85.82	102,34
	SMA/SMK/MA (%)	100	100	93,73	0

Sumber : Kabupaten Malinau Dalam Angka (2019), Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau (2020), Kabupaten Malinau Dalam Angka (2020), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

2. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan hal penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi prioritas pembangunan di berbagai daerah, tak terkecuali di Kabupaten Malinau. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan untukmemperoleh layanan kesehatan yang mudah, murah, adil dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Malinau, lebih menekankan kepada upaya preventif dan promotive tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2. 17
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan	89	82	81	80,3

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
K4 di fasilitas pelayanan kesehatan				
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95,2	93	93	91,6
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	97,1	90	100
Cakupan bayi baru lahir 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	76,6	83	83	79,8
AKI per 100.000 Kelahiran hidup	251	0	124	62,5
AKB per 1000 Kelahiran Hidup	18	11	16,8	11,3
Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	45	83	63,6	57,1
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100
Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	80	92	79	41,1
Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization)	66	74,3	75,2	62,40
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	78,9	55,8	32,2	100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	53	81	70,1	100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	16,3	32,8	100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	80,4	100	65	58,3
Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko HIV	60	65	70	19,77
Prevalensi HIV/AIDS	0,03	0,04	0,06	0,3
Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	100	103,5	100	n.a
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	31,3	62,5	62,5	n.a
Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	14,4	14	20	n.a
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan	85	92,4	97	n.a
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	31,3	62,5	90	n.a
Persentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis	29	56	94	n.a

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Masyarakat)				
Prevalensi peserta KB aktif	54,2	10	28,9	n.a
Rasio PLKB/PKB di desa	0	11	11	n.a
Prevelensi Stunting	27	24,6	31,01	14,47
Jumlah puskesmas	14	16	16	16
Jumlah rumah sakit	3	3	3	3

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau (2020)

Berdasarkan Tabel 2.17 dapat diketahui bahwa dari berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja layanan bidang kesehatan, layanan kesehatan di Kabupaten Malinau cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian bukan berarti tidak terdapat kekurangan, sebagai contoh adalah masih ditemukannya kasus gizi buruk, kematian ibu dalam melahirkan, angka kematian dalam kelahiran. Ini menjadi hal yang patut diperhatikan di masa mendatang. Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Anak yang mengalami stunting akan terlihat pada saat menginjak usia dua tahun. Kementerian Kesehatan RI menyebut stunting adalah anak balita dengan nilai z-skor untuk kategori tinggi badan per umur (TB/U) kurang dari -2SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -3SD (severely stunted). Berdasarkan WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tak memadai. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Stunting di Kabupaten Malinau dapat disajikan di tabel dibawah ini.

Tabel 2. 18
Data Stunting Per Puskesmas Kabupaten Malinau Tahun 2020

No	Kecamatan	Uraian			
		Puskesmas	Jumlah Balita	Jumlah Balita Status Pendek Dan Sangat Pendek	Persentase Stunting (%)
1	Mentarang Hulu	Long Berang	122	1	0,82

No	Kecamatan	Uraian			
		Puskesmas	Jumlah Balita	Jumlah Balita Status Pendek Dan Sangat Pendek	Persentase Stunting (%)
2	Mentarang	Pulau Sapi	240	49	20,42
3	Bahau Hulu	Long Alango	135	16	11,85
4	Pujungan	Pujungan	211	35	16,59
5	Kayan Hulu	Long Nawang	158	20	12,66
6	Kayan Selatan	Long Ampung	216	54	25
7	Sungai Boh	Sungai Boh	221	8	3,62
8	Kayan Hilir	Data Dian	56	7	12,5
		Long Sule	76	9	11,84
9	Malinau Selatan Hulu	Metut	210	55	26,19
10	Malinau Selatan	Loreh	364	73	20,05
11	Malinau Selatan Hilir	Setulang	138	31	22,46
		Sehati	223	45	20,18
12	Malinau Barat	Tanjung Lapang	221	19	8,6
		Sesua	276	23	8,33
13	Malinau Kota	Malinau Kota	1588	207	13,04
14	Malinau Utara	Malinau Seberang	454	39	8,59

Sumber : Tim Stunting Malinau 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah, karena jaringan infrastruktur yang baik dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari antar daerah/wilayah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah, tak terkecuali untuk Kabupaten Malinau. Kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Malinau, khususnya dalam pembangunan infrastruktur (sarana prasarana) dapat dilihat dari capaian kinerja berbagai di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dari berbagai indikator tersebut, capaian kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang cenderung mengalami penurunan (Lihat Tabel 2.19). Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur di wilayah ini masih belum memadai dan masih harus terus ditingkatkan. Perkembangan RTRW dan RDTR dalam proses menyelesaikan perda RTRW dan RDTR.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni ataukawasan kumuh.Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni, pembangunan jalan perumahan dan drainase yang memadai, serta pembangunan sanitasi (IPAL Komunal, MCK, dan Tempat Pembuangan Sampah) yang layak, merupakan program yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga kualitas lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dari tahun ke tahun telah berhasil meningkatkan persentase rumah layak huni di Kabupaten Malinau,yakni 87,23% pada tahun 2017 dan tahun 94,15% pada tahun 2018 serta 92,44% pada tahun 2019 (Lihat Tabel 2.19). Namun demikian bukan berarti permasalahan permukiman kumuh di wilayah ini telah terselesaikan secara tuntas.

Tabel 2. 19
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TIAP TAHUN (%)			
	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	99,75	49,82	49,68	7,60
Persentase panjang jalan kabupaten yang di rehabilitasi/direkontruksi	1,45	0,62	4,24	n.a
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di ws kewenganan kabupaten	10,23	10,23	10,23	5 km
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	46,77	64,26	70,45	0,57
Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	n.a	n.a	9,99	80
Persentase tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	n.a	52,94	52,94	n.a
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi	n.a	n.a	0	n.a
Rumah tangga bersanitasi	73,65	76,8	73,03	73,03
Rumah tangga pengguna air bersih	89,17	54,58	90,79	n.a
Kawasan kumuh	0,04	0,17	0,05	0,21

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TIAP TAHUN (%)			
	2017	2018	2019	2020
Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah	30	5,58	5,58	n.a
Rumah layak huni	87,23	94,15	92,44	n.a
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	49,91	41,33	42,75	47,7

Sumber : Dinas PUPR dan PERKIM Kabupaten Malinau (2020)

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Seluruh aktifitas pembangunan di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, dan politik yang stabil di daerah, karenastabilitas keamanan dan politik akan mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Berdasarkan indikator capaian kinerja bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel 2.20 dapat diketahui bahwa jaminan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat belum dapat diwujudkan secara maksimal.

Tabel 2. 20
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Capaian Tiap Tahun (%)			
	2017	2018	2019	2020
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	100	100	100	n.a
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	60	80	80	n.a
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	1,23	1,23	1,23	n.a
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten	14,71	14,71	14,71	n.a
Tingkat waktu tanggap (*response time rate*)	100	100	100	n.a
Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar	51,85	50,91	52,73	n.a

Indikator Kinerja	Capaian Tiap Tahun (%)			
	2017	2018	2019	2020
kualifikasi				
Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 liter	42,86	42,86	42,86	n.a

Sumber : Satpol PP dan DAMKAR Kabupaten Malinau (2020)

6. Sosial

Pemasalahan sosial yang meliputi: (1) anak terlantar dan orang terlantar/tidak mampu; (2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (3) penyandang cacat dan trauma; (4) kelembagaan sosial yang diberdayakan; dan (5) Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), sangat menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang harus diselesaikan.Beberapa upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau diantaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PMKS, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran sertapotensi sumber daya kesejahteraan sosial. Sebagai hasilnya adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.21. Berdasarkan data pada Tabel 2.21 dapat diketahui bahwa masih ditemukan adanya permasalahan fakir miskin, KAT dan PMKS.

Tabel 2. 21
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Capaian Tiap Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah anak terlantar dan orang terlantar/tidak mampu yang mendapatkan perlindungan (berupa bantuan transport kembali ke daerah asal)	0	0	0	n.a
Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan yang diberikan bantuan	n.a	20	0	n.a
Jumlah penyandang cacat dan trauma yang diberdayakan	n.a	1	0	n.a
Jumlah kelembagaan yang diberdayakan	1	1	1	n.a
Jumlah Fakir Miskin	-	-	32.479	n.a
Jumlah KAT (Komunitas Adat Terpencil)	73	73	85	n.a
PMKS		617	617	n.a

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Malinau (2020)

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Malinau harus disikapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja tersebut. Jika terjadi keterbatasan lapangan pekerjaan, maka sebagai akibatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Malinau semakin meningkat pula. Berdasarkan data statistik Kabupaten Malinau, Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja, cenderung mengalami peningkatan, sementara tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Malinau cukup berfluktuaktif. Upaya-upayauntuk menekan angka pengangguran tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, misalnya dengan melakukan upaya-upaya meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal dan meningkatkan potensi dan kompetensi tenaga kerja agar lebih produktif dan kompetitif melalui pendidikan dan pelatihanketerampilan. Namun demikian tingkat pengangguran di wilayah ini belum dapat dituntaskan (Lihat Tabel 2.22), sehingga masih dibutuhkan upaya lanjutan di masa mendatang.

Tabel 2. 22
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

INDIKATOR KINERJA		TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk 15 Th + (ribu jiwa)		**57.816**	**59.958**	**63.156**	**62.162**
-	Angkatan Kerja	71,88	75,29	68,86	66,44
-	Bukan Angkatan Kerja	28,12	24,71	31,14	33,56
TPAK (%)		**71,88**	**75,29**	**68,86**	**66,44**
-	Laki-Laki	84,98	87,83	83,15	81,69
-	Perempuan	55,56	59,36	51,2	48,17
Tingkat Kesempatan kerja %		**93,99**	**95,72**	**95,87**	**94,92**
Tingkat Pengangguran terbuka %		**6,01**	**4,28**	**4,13**	**5,08**

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau (2020), Kabupaten Malinau dalam Angka 2021

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam perkembangannya, penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungananak lebih diarahkan untuk meningkatan peran serta (partisipasi) perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah umumnya dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan. Sedangkan hak-hak anak diwujudkan melalui perlindungan anak. Capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari berbagai indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), persentase angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Sesuai dengan uraian di atas, capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Malinau adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.23. Tabel 2.23 menunjukkan masih adanya permasalahan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan yang masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Disamping itu masih ditemukan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya persentase angkatan kerja perempuan.

Tabel 2. 23
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	9,99	10,07	10,06	n.a
Rasio KDRT (%)	0,002	0,005	0,005	n.a
Persentase angkatan kerja perempuan (%)	72,91	73,78	74,9	n.a
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	18	14	9	n.a

INDIKATOR KINERJA	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
(kasus selesai)				

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau (2020)

3. Ketahanan Pangan

Urusan wajib ketahanan pangan di KabupatenMalinau, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, juga berfokus pada pelaksanaan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan.Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, khususnya beras, daging, minyak, telur, ikan, kacang-kacangan, gula dan sayuran. Ketersediaan pangan utama tersebut dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan (Lihat Tabel 2.24). Namun demikian, ketersediaan pangan utama tersebut masih berada di bawah perkembangan konsumsi pangan utama secara nasional (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 2019). Oleh karenanya ketersediaan pangan utama di Kabupaten Malinau masih harus terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Tabel 2. 24
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Ketahanan Pangan
Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Ketersediaan Tiap Tahun (kg/kapita/th)			
	2017	2018	2019	2020
Padi-padian	20,91	21,33	21,75	n.a
Umbi-umbian	2,24	2,29	2,33	n.a
Pangan hewani	13,57	13,84	14,11	n.a
Minyak dan lemak	3,06	3,12	3,18	n.a
Buah/biji berminyak	0,61	0,62	0,64	n.a
Kacang-kacangan	9,89	10,09	10,29	n.a
Gula	2,24	2,29	2,33	n.a
Sayuran dan buah	19,38	19,77	20,16	n.a

Sumber : BPS Kabupaten Malinau (2020)

4. Lingkungan Hidup

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) atau perusahaan swasta harus dilaksanakan dengan bijaksana, agar daya dukung lingkungan hidup tetap terjaga dan

tercipta iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Perlindungan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendaliaan pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakankebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lestari. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dapat meliputi pelaksanaan pengawasan dokumen lingkungan (AMDAL) yang telah diterbitkan izin lingkungan, penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber daya air serta ruang terbuka hijau (RTH) per satuan luas wilayah, yang perkembangannya di Kabupaten Malinau dapat dilihat padaTabel 2.25. Berdasarkan data pada tabel 2.25 dapat dinyatakan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup masih sangat minim, jika dilihat dari upaya penghijauan wilayah pada wilayah lahan longsor. Sesuai dengan Surat Edaran No 4 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, maka untuk urusan lingkungan hidup wajib menyampaikan data capain indeks lingkungan hidup yang terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas air laut.

Tabel 2. 25
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	0,343	0,33	0,317	n.a
Cakupan Pelaksanaan pengawasan dokumen lingkungan (AMDAL) yang telah diterbitkan/dikeluarkan izin lingkungan	4	3	3	n.a
Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan longsor dan Sumber Daya Air (ha)	n.a	100	170,9	n.a
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	n.a	n.a	n.a	n.a
Penanganan Limbah B3	n.a	n.a	n.a	n.a

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Indeks Lingkungan Hidup	n.a	n.a	n.a	n.a
Indeks Kualitas Air	n.a	n.a	n.a	50
Indeks Kualitas Udara	n.a	n.a	n.a	94
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	n.a	n.a	n.a	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau (2020), Kementerian Lingkungan Hidup (2021)

Secara umum Kabupaten Malinau masih menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam menghadapi pencapaian indikator TPB, hal ini didasarkan pada capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data yang tersedia menunjukkan indikator TPB di Kabupaten Malinau yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional telah mencapai 33 % atau sebanyak 32 indikator dari total 98 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Malinau. Indikator TPB kewenangan Kabupaten Malinau yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional mencapai 11 % atau sebanyak 11 indikator. Sementara untuk Indikator TPB kewenangan Kabupaten Malinau yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 1 indikator. Indikator TPB kewenangan Kabupaten Malinau yang belum/ tidak memiliki data sebanyak 55 % atau sebanyak 54 indikator. Capaian indikator TPB Kabupaten Malinau terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel 2.26.

Tabel 2. 26
Capaian Indikator TPB Kabupaten Malinau Terhadap Target Nasional

NO	KRITERIA	INDIKATOR (jumlah)	PERSENTASE (%)
1	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target	32	33
2	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target	11	11
3	Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target	1	1
4	Indikator TPB yang belum memiliki data	54	55
	Total indikator TPB Kabupaten Malinau	98	100

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.Terkait dengan urusan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau menunjukkan kinerja yang masih fluktuatif dilihat dari realisasi atas target yang telah ditetapkan, khususnya jika ditinjau dari indikator persentase kepemilikan KTP, bayi berakte kelahiran dan penerbitan kartu keluarga (Lihat tabel 2.26). Data tersebut juga mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP, akte kelahiran dan kartu keluarga.

Tabel 2. 27
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Persentase Kepemilikan KTP	65	80	87	n.a
Persentase Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	65	80	87	n.a
Persentase bayi berakte kelahiran usia 0-18 tahun	68	71	80	n.a
Pasangan berakte nikah (Non Muslim)	44	47	57	n.a
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	47	54	55	n.a
Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	88	84	81	n.a

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau (2020)

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat

diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui indikator jumlah peserta KB aktif dan baru, jumlah kelompok akseptor KB, jumlah klinik KB, dan cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif. Berkenaan dengan hal ini, capaian kinerja dalam pengendalian penduduk dan KB dapat dilihat pada Tabel 2.28. Patut menjadi catatan bahwa di kabupaten Malinau, pemerintah tidak melayani pelayanan KB, sehingga program KB dilakukan secara mandiri. Banyak peserta yang tidak terlaporkan karena tidak dilakukan pencatatan oleh petugas, hal ini berdampak pada cakupan pelayanan KB dari tahun 2017-2020 mengalami penurunan secara signifikan, dengan upaya penertiban pencatatan/laporan puskesmas melalui pendataan PIS-PK, cakupan pelayanan KB tahun 2019 mengalami peningkatan.

Tabel 2. 28
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Peserta KB Baru	990	610	192	n.a
Jumlah Peserta KB Aktif	988	613	3.897	n.a
Jumlah Kelompok Akseptor	n.a	n.a	n.a	n.a
Jumlah Klinik KB	n.a	n.a	12	n.a
Cakupan Sasaran Pasangan Usia subur menjadi peserta KB Aktif	1.027	12.573	13.452	n.a

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (2020)

7. Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan memberikan kemudahan dalam pergerakan manusia, barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Dengan demikian bermakna bahwa pertambahan sarana angkutan umum dan

kendaraan pribadi harus diiringi dengan pembangunan prasarana jalan, jembatan, dermaga/ pelabuhandan/atau terminal yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Beberapa indikator kinerja bidang perhubungan adalah jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang melalui terminal/pelabuhan/udara per tahun. Berkenaan dengan hal ini perkembangannya di Kabupaten Malinau dapat dilihat pada Tabel 2.28. Tabel 2.28 menunjukkan kecenderungan peningkatan kedatangan dan keberangkatan orang dari dan keluar Kabupaten Malinau. Oleh karenanya layanan terhadap mobilitas masyarakat tersebut harus menjadi perhatian dan perlu untuk terus ditingkatkan.

Tabel 2. 29
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Bidang	INDIKATOR KINERJA	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Udara	Jumlah Keberangkatan	22.357	11.340	44.018	n.a
	Jumlah Kedatangan	19.619	31.716	39.502	n.a
Darat	Jumlah Keberangkatan	6.496	11.340	15.162	n.a
	Jumlah Kedatangan	3.764	5.559	8.661	n.a

Sumber: Dinas Perhubungan - UPTD Terminal (2020)

8. Komunikasi dan Informatika

Sehubungan dengan perkembangan sistem IT, penyelenggaraan urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika menjadi hal yang sangat strategis bagi daerah, hal tersebut dapat dilihat dampaknya dari berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbasis informasi teknologi. Berbagai urusan di bidang pemerintahan dan layanan terhadap masyarakat telah diselenggarakan melalui sistem informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik.Pemerintah Kabupaten Malinau telah memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat *http://www.malinau.go.id* dan juga terdapat subdomain yang dikelola oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan sistem informasi, Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan pemberdayaan dan pengembangan desa yang terjangkau komunikasi. Sedangkan

capaian kinerja bidang komunikasi dan informatika di wilayah ini adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.30. Dalam hal ini, masih terdapat desa yang belum terjangkau sistem komunikasi dan iformasi.

Tabel 2. 30
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Keberadaaan *Website* Milik Pemerintah Kabupaten Malinau	n.a	100	100	n.a
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Kecamatan	n.a	30	n.a	n.a
Persentase desa yang terjangkau komunikasi	70	95.41	95,41	n.a

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malinau (2020)

9. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan perekonomian kerakyatan. Pertumbuhan koperasi, usaha kecil, dan menengah didaerah, dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, karena keberadaan koperasi, usaha kecil, dan menengah di tengah masyarakat dapat menjadi wadah untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi produk-produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, yang selanjutnya dapat memberikankontribusi terhadap PDRB kabupaten dan penyerapan tenaga kerja.

Perkembangan koperasi dan UKM serta perkembangan kemampuan manajemennya dapat di lihat pada Tabel 2.30, dimana terlihat adannya peningkatan dalam jumlah dan yang mampu menjalankan kegiatan sesuai kaidah manajemen. Namun terlihat bahwa kemampuan pengelolaan/manajemennya masih perlu mendapatkan pembinaan/pendampingan.

Tabel 2. 31
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Tahun			
	2017	2018	2019	2020

Persentase koperasi aktif (%)	73	78	78	65
Jumlah UKM (unit)	506	506	506	n.a
Persentase koperasi yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen (%)	21	25	28	n.a
UKM yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen (unit)	506	506	506	n.a

Sumber : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malinau (2020)

10. Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Malinau memberikan dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barangdan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor. Kinerja penanaman modal di Kabupaten Malinau dapat dilihat diantaranya melalui jumlah investor berskala nasional yang ada di Kabupaten Malinau, jumlah investasi yang dikeluarkan investor berskala nasional cenderung meningkat, namun baru mencapai 6 (enam) ratusan miliar rupiah pada tahun 2019 (Lihat Tabel 2.32).

Tabel 2. 32
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal
Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	-	-	n.a
PT	-	-	9	n.a
CV	-	-	25	n.a
UD/Toko	-	-	23	n.a

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Malinau (2020)

Tabel 2. 33
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal
Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR	TAHUN

	2017	2018	2019	2020
PMA	n.a	n.a	225.000.000	374.000.000.000
PMDN	n.a	n.a	613.796.000.000	54.000.000.000
PMA dan PMDN	n.a	n.a	614.021.000.000	428.000.000.000

Sumber : Dinas DPMPTSP Kabupaten Malinau (2021)

11. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Aparatur Sipil Negara semata, organisasi kepemudaan yang pengurus dan anggota terdiri atas pemuda dan pemudi juga dapat memberikankontribusi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Oleh karenanya, pembinaan terhadap organsiasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah tersebut.Selain itu, aktifitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuh kembangkan kreatifitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung aktifitas kepemudaan dan olahraga menjadi penting dan stategis bagi daerah untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan fakta menunjukkan jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Malinau mengalamipeningkatan dari tahun ke tahun (Lihat Tabel 2.33).

Tabel 2. 34
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Pemuda: persentase organisasi kepemudaan yang aktif	65,01	79	94	n.a
Jumlah Organisasi Olahraga: persentase organisasi olah raga yang aktif	65	70	73	n.a

Sumber : Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Malinau (2020)

12. Statistik

Sebuah rencana yang baik dapat dihasilkan dari perencanaan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini tidak terkecualikan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau harus terus melakukan upaya untuk menyediakan dan melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pembangunan daerah.Beberapa dokumen yang telah disusun oleh Kabupaten Malinau, baik disusun oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan lembaga/instansi terkait. Dokumen-dokumen statistik tersebut diantaranya yaitu Malinau Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indikator Sosial Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dokumen statistik lainnya. Tetapi dalam berbagai perencanaan daerah masih sangat dirasakan bahwa data yang tersedia masih kurang, bahkan dalam berbagai pertemuan data yang dipublikasikan oleh pihak pemerintah daerah tersebut masih sering diperdebatkan, sehingga mengupayakan kecukupan data dan meningkatkan validitas berbagai data tersebut masih perlu dilakukan.

13. Persandian

Persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yangtidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib persandian merupakan urusan baru, yang menjadi kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Perangkat daerah yang sudah menggunakan sandi dalam komunikasi pada tahun 2017 sampai tahun 2019 sebanyak 1 (satu) perangkat daerah. Prestasi ini tentu masih jauh dari harapan dan belum optimal, sehingga di masa mendatang perlu ditingkatkan, khususnya bagi perangkat daerah yang informasinya perlu dilindungi dari pihak-pihak yang tidak bertangging jawab.

Tabel 2. 35

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persandian Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	1	1	1	n.a
persetase pengamanan informasi	0	0	0	n.a

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Malinau (2020)

14. Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan merupakan lembaga pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ataukarya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi baca para pemustaka. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu system kearsipan daerah yang didukung oleh sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, serta sumberdaya lainnya. Layanan kepustakaan dan kearsipan di Kabupaten Malinau cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, namun layanan kepustakaan dengan pendekatan penggabungan cara elektronik dan cetak (*hybrid library*) cenderung masih kurang atau belum optimal (Lihat Tabel 2.35), sehingga perlu terus dikembangkan.

Tabel 2. 36
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah arsip OPD dan dari gudang umum Setkab Malinau yang telah didata dan ditata	53	64	113	n.a
Jumlah sekolah/desa yang dikunjungi oleh perpustakaan keliling dan mobil pintar	18	25	30	n.a

Sumber : Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Malinau (2020)

2.3.3 Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Malinau terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malinau, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau dari sektor pariwisata. Berdasarkan data yang ada, capaian kinerja pariwisata Kabupaten Malinau cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik ditinjau berdasarkan kujungan wisata, partisipasi kelompok budaya, maupun pelestarian jumlah warisan budaya. Hal ini merupakan hasil positif dari berbagai promosi wisata Kabupaten Malinau, yang dilakukan dengan cara memperkenalkan kebudayaan tradisional/adat masyarakat lokal di berbagai *event* nasional maupun internasional. Tetapi, diketahui bahwa jumlah kunjungan wisata ke daerah ini cenderung masih rendah/kurang (Lihat Tabel 2.36) jika dibandingkan daerah lain yang sudah maju fasilitas/infrastruktur wisatanya.

Tabel 2. 37
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
	%	%	%	
Kunjungan Wisata	50	95	308	1.535
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kelompok Seni Dan Budaya	100	100	100	n.a
Jumlah Warisan Budaya Yang Dilestarikan (Cagar Budaya)	100	100	120	n.a

Sumber : Dinas Pariwisata Dan Budaya Kabupaten Malinau (2020)

2. Pertanian

Kondisi Kabupaten Malinau yang agraris, menjadikan sektor pertanian berkontribusi cukup dominan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Malinau. Pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, sejahterah, dan berdaya saing. Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Malinau dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya, yaitu

menodorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.Kinerja di bidang pertanian dapat dinilai melalui indikator kinerja di bidang pertanian, meliputi peningkatan produksi tanaman pangan, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan lembaga tani yang menerapkan teknologi pertanian. Berdasarkan indikator tersebut, diketahui bahwa kinerja sektor pertanian Kabupaten Malinau dalam kontribusinya terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan, namun dalam produksi tidak mengalami peningkatan (Lihat Tabel 2.37). Hal ini berarti persoalan rendahnya produktifitas pertanian, khususnya tanaman pangan (padi) masih menjadi tantangan.

Tabel 2. 38
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pertanian Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Peningkatan produksi padi (ton)	17.265	15.861	11.799	n.a
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (milliar Rp)	1.033,60	1.076,08	1.170,12	1.276,93

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Malinau (2020)

3. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan budidaya yang cenderung mengalami peningkatan akan sangat berperan dalam mendorong peningkatan konsumsi ikan di masyarakat dan berkembangnya produk olahan berbahan baku ikan. Dimana ketiga hal tersebut menjadi indikator utama kinerja di bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan tiga indikator tersebut diketahui kinerja sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Malinau sebagaimana tersaji pada Tabel 2.38. Berdasarkan Tabel 2.38 dapat dinyatakan bahwa produksi perikanan budidaya Kabupaten Malinau masih rendah dan cenderung naik turun bobotnya, sedangkan produksi perikanan tangkap cenderung mengalami penurunan, sementara

konsumsi ikan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian yang menjadi persoalan dan tantangan adalah bagaimana meningkatkan produktifitas perikanan, khususnya perikanan budidaya.

Tabel 2. 39
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TIAP TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Produksi perikanan budidaya (ton)	144,3	93,34	126,56	41,52
Konsumsi ikan (kg/Kapita)	28,11	54,23	59,25	n.a
Produksi perikanan tangkap (ton)	144,56	101,79	94,43	95,62

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Malinau (2020)

4. Perindustrian dan Perdagangan

Sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Malinau. Kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian di Kabupaten Malinaubelum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB serta pertumbuhan industri kecil dan rumah tangga di Kabupaten Malinau yang cenderung masih tidak stabil dan masih rendah dibanding sektor lainnya.

Tabel 2. 40
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TIAP TAHUN (%)			
	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB	2,86	2,77	2,59	2,56
Pertumbuhan Industri Kecil dan Rumah Tangga	2,95	2,14	n.a	n.a
Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	4,02	4,13	4,17	4,39

Sumber : Malinau dalam Angka (2021)

5. Kehutanan

KabupatenMalinaumemilikiarealhutandengan luas lebih dari satu jutahektar (data belum tersedia dengan tepat),denganrincian dari tahun 2017-2019, KawasanHutanSuakaAlam(994.054,20 Ha),KawasanHutanLindung(674.768,48 Ha),KawasanHutan ProduksiTerbatas(1.564.801,40 Ha),KawasanHutanProduksiTetap(365.158 Ha)dan KawasanHutanProduksiKonversi (30.117,50 Ha). Sedangkan program peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2018-2019 sebasar 10 hektar. Keberadaan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi tersebut menyiratkan adanya proses perubahan hutan alam yang mengarah pada degradasi dan deforestasi akibat aktifitas eksploitasi hasil hutan kayu. Hal patut menjadi perhatian khusus, agar kegiatan produksi di kawasan hutan tersebut dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku dan pengelolaan hutan secara lestari, sehingga terwujudnya harapan "hutan memberi manfaat yang terus menerus".

Tabel 2.41
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kehutanan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TIAP TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Luas areal hutan (Ha)	n.a	n.a	n.a	n.a
Kawasan Hutan Suaka Alam (Ha)	994.054,20	994.054,20	994.054,20	n.a
Kawasan Hutan Hutan Lindung (Ha)	674.768,48	674.768,48	674.768,48	n.a
Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Ha)	1.564.801,40	1.564.801,40	1.564.801,40	n.a
Kawasan Hutan Produksi Tetap (Ha)	365.158	365.158	365.158	n.a
Kawasan Hutan Produksi Konversi (Ha)	30.117,50	30.117,50	30.117,50	n.a
Bertambahnya populasi tanaman kehutanan untuk penghijauan dan konservasi lingkungan (juta pohon)	n.a	-	-	n.a
Terwujudnya peningkatan	n.a	10	10	n.a

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TIAP TAHUN 2017	2018	2019	2020
rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)				
Terwujudnya sarana dan prasarana konservasi tanah dan air (unit)	n.a	-	4	n.a
Produksi Kayu Bulat/log (m³)	n.a	n.a	n.a	n.a
Produksi Kayu Olahan/log (m³)	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau (2019)

2.3.4 Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Kinerja tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari berbagai indikator kinerja, diantaranya yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Pebaikan dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malinau tersebut dapat diketahui hasilnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.42. Berdasarkan Tabel 2.42 tersebut dapat diketahui bahwa masih belum primanya tata kelola yang dilakukan.

Tabel 2.42
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja	Capaian Tiap Tahun 2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n.a	CC	C	C
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
NILAI SAKIP	CC	CC	CC	CC
NILAI LPPD	Tinggi		Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: Inspektorat Pemkab Malinau dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (2021)

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Peran sektor primer pertambangan dan penggalian serta pertaniam, kehutanan, perikanan dan peternakan masih sangat dominan memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau,oleh karenanya perlambatan pertumbuhan pada dua sektor tersebut berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau (Lihat Gambar 2.13 dan 2.14).

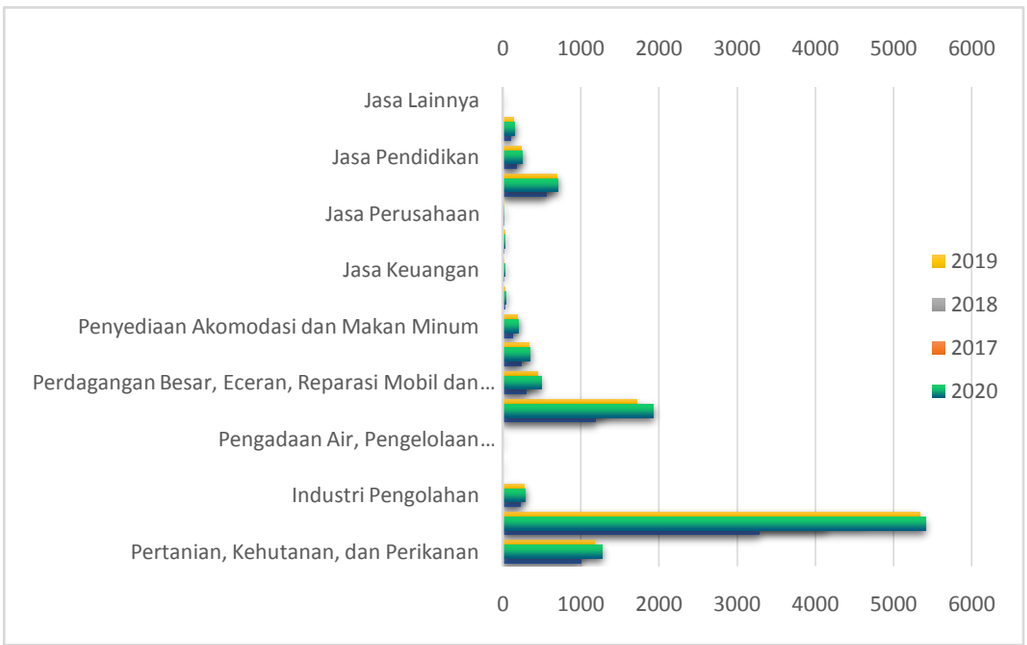

Sumber : Malinau Dalam Angka (2019), Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 2. 13Ekonomi Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

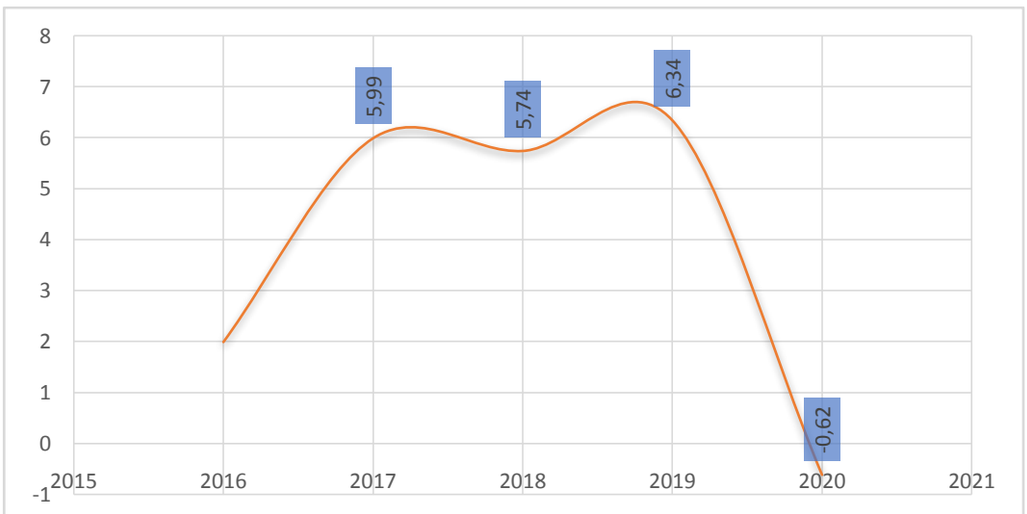

Sumber : Malinau Dalam Angka (2019) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 2.14Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat menggambarkan karakteristik masyarakat Kabupaten Malinau yang ekonomi rumah tangganya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan primer (pokok). Hal ini juga terlihat dari pengeluaran rata-rata perkapita di Kabupaten Malinau yang cukup tinggi dan cenderung mengalami peningkaan setiap tahunnya untuk kelompok barang makanan, sedangkan pengeluaran perkapita menurut kelompok barang bukan makanan cenderung meningkat secara fluktuatif (Lihat Tabel 2.43 dan 2.44).

Tabel 2.43
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang makanan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020 (Rp)

KELOMPOK BAHAN MAKANAN	PENGELUARAN RATA-RATA PER BULAN TIAP TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Padi-padian	87.015	92.169	92.149	90086
Umbi-umbian	7.57	6.289	7.258	5380
Ikan/ udang/ cumi/ kerang	74.766	91.428	88.593	93475
Daging	55.553	50.665	61.373	54267
Telur dan Susu	42.525	46.187	44.810	51717
Sayur-sayuran	67.954	63.603	58.518	62874
Kacang-kacangan	10.091	11.814	10.883	11675
Buah-buahan	19.248	30.084	24.574	41884
Minyak dan Kelapa	14.549	16.965	14.364	16310
Bahan Minuman	26.440	28.130	26.443	26419
Bumbu-bumbuan	15.265	18.228	14.616	17405
Konsumsi Lainnya	13.053	12.304	14.425	13642
Makanan dan Minuman Jadi	138.498	207.919	146.214	203102
Rokok dan tembakau	88.853	77.900	79.935	101756
Jumlah	653.810	753.685	686.174	789.992

Sumber: Malinau Dalam Angka (2019),Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau (2021).

Tabel 2. 44
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Bukan Makanan Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020 (Rp)

KELOMPOK BARANG BUKAN MAKANAN	PENGELUARAN RATA-RATA PER BULAN TIAP TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	416.551	753.684	414.084	439025
Aneka barang dan jasa	145.692	509.887	150.481	177020
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	25.128	213.471	29.966	34718
Barang tahan lama	28.269	40.761	36.782	73879
Pajak, pungutan, dan asuransi	34.285	72.895	44.087	52490
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	8.162	49.980	18.576	11307
Jumlah	658.087	1.640.678	693.976	788.439

Sumber: Malinau Dalam Angka (2019), Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau (2021).

2.4.2 Fokus Wilayah dan Infrastruktur

Percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Malinau membutuhkan ketersediaan prasarana dan sarana (infrastruktur) yang memadai. Oleh karenya pembangunan infrastruktur merupakan aspek sangat penting dan vital di dalam proses percepatan pembangunan di daerah ini. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai akan menjadikanKabupaten Malinau memiliki keunggulan daya saing dibandingkan dengan daerah lainnya. Pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) pendukung tersebut tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah saja, akan tetapi sangat ditentukan oleh gerak dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah, dimanaketerlibatan dunia usaha dalam bentuk investasi di daerah akan dapat menciptakan percepatan dan pemerataan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai sebagai penunjang pembangunan tersebutmeliputi infrastruktur jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sanitasi, dan

ketersediaan air minum serta energi. Bagaimana ketersediaan jaringan jalan, listrik dan air minum disajikan pada Tabel 2.45, 2.46 dan 2.47.

Tabel 2. 45
Kondisi Jalan di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

URAIAN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Jalan Negara (km)	0	0	0	n.a
Jalan Provinsi (km)	0	111,82	0	n.a
Jalan Kabupaten (km)	325,32	1.043,20	1043,2	1043,2
a. Baik	192,6	68,06	72,02	79,19
b. Sedang	88,54	451,74	446,26	439,50
c. Rusak	27,74	113,84	116,5	108,33
d. Rusak Berat	16,44	409,56	408,43	416,22
Total Jalan	325,32	1.043,20	1043,20	1043,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2020. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021

Infrastruktur jalan di Kabupaten Malinau terdiri dari jalan negara, jalan provinsi, dan jalan Kabupaten. Total panjang jalan Kabupaten Malinau mencapai 1.043,2 km, jalan di Kabupaten Malinau ini belum proporsional bila dibandingkan luas wilayah dan penyebaran area permukiman penduduk, sehingga konektifitas antar wilayah permukiman di daerah ini masih sangat rendah. Selain infrastruktur jalan, tenaga listrik merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi daerah dalam menggerakkan roda ekonomi di masyarakat. Produksi listrik, daya terpasang dan listrik terjual di Kabupaten Malinau cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, data disajikan di tabel 2.46. Hal ini juga diikuti oleh kenaikan jumlah pelanggan PT. PLN. Namun, demikian ketersediaan listrik di wilayah ini belum dapat menjangkau seluruh penduduk di wilayah ini, khususnya pada wilayah-wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten atau kecamatan.

Tabel 2. 46
Jumlah Pelanggan dan Produksi pada PT. PLN (Persero) Ranting Malinau di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

URAIAN	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggan	**17.445**	**19.352**	**14.431**	16.386
a. Rumah Tangga	15.293	17.170	19.175	n.a
b. Sosial	620	591	695	n.a
c. Perkantoran	254	264	279	n.a
d. Badan Usaha	1.206	1.252	1.312	n.a
e. Industri	8	**11**	14	n.a
f. Penerangan Jalan Umum	64	64	64	n.a
g. Layanan Khusus	0	0	0	n.a
Produksi Listrik				
a. Daya Terpasang (KW)	31.988.492	35.636.400	39.748.300	32.381.700
b. Produksi Listrik (KWh)	54.692.610	57.387.990	63.793.650	69.734.397
c. Listrik Terjual (KWh)	51.818.201	55.105.039	61.071.168	67.222.863
d. Dipakai Sendiri (KWh)	n.a	n.a	n.a	2.844
e. Susut/Hilang (KWh)	2.874.420	2.282.950	2.722.480	3.115.911

Sumber : Malinau Dalam Angka (2019),Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau (2021)

Disisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih dan sehat (air minum) semakin meningkat, hal ini seriring dengan pertumbuhanpenduduk dan pertumbuhan sektor swasta/industri yang semakin bertambah. Pemenuhan kebutuhan akan air minum bersih dan sehat (air minum) di Kabupaten Malinau dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Air minum yang disediakan oleh PDAM disalurkan ke sektor rumah tanggadan kantor pemerintah, diikuti oleh sektor hotel/toko/industri/perusahaan, dan badan sosial/rumah ibadah disajikan pada Tabel 2.47. Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pelanggan pada berbagai jenis konsumen cenderung selalu mengalami peningkatan/kenaikan, namun air

minum tersebut belum dapat menjangkau seluruh penduduk di wilayah ini, terutama bagi bagi penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil. Telekomunikasi merupakan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Ketersediaan layanan telekomunikasi di suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah memiliki kesadaran akan informasi. Terlebih di masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada akhir 2019, ketersediaan layanan telekomunikasi menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam berbagi informasi dan melakukan berbagai aktivitas di rumah akibat *sosial distancing*. Cakupan layanan telekomunikasi di tingkat kecamatan didapatkan dengan membagi luas wilayah yang tercoverage dengan luas wilayah keseluruhan dikalikan dengan 100 persen. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Utara, data cakupan layanan telekomunikasi merupakan kewenangan pusat. Akan tetapi, terdapat data jumlah blankspot dalam satuan desa atau kelurahan. Jumlah blankspot di Kabupaten Malinau jumlahnya ada 10 desa atau kelurahan, dan setiap tahun jumlahnya tetap. Sedangkan di tabel 2.47 jumlah pasar tradisional dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan dari 12 unit pasar meningkat menjadi 18 unit pasar tradisional yang aktif.

Tabel 2. 47
Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

JENIS KONSUMEN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga (tempat tinggal) dan instasi/kantor pemerintah	6.474	7.977	8.651	n.a
Hotel/objek wisata, toko industri, perusahaan	1.835	1.989	2.157	n.a
Badan Sosial, Rumah Sakit, Rumah Ibadah, dst	52	52	214	n.a
Sarana Umum	0	0	0	

Jumlah	8.361	10.018	11.022	12.416

Sumber :PDAM Kabupaten Malinau (2021)

Tabel 2. 48
Jumlah Blankspot di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

JENIS KONSUMEN	TAHUN			
	SATUAN	2017	2018	2019	2020
Jumlah Blankspot	Desa/kel	10	10	10	n.a

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2019

Tabel 2. 49
Jumlah Pasar Tradisional di Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

JENIS KONSUMEN	TAHUN				
	SATUAN	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pasar Aktif	unit	12	18	18	n.a
Jumlah Pasar Non Aktif	unit	0	0	0	0

Sumber Dinas Perdagangan dan Industri 2020.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Keamanan dan Ketertiban

Arus investasi ke daerah harus didukung dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang baik. Kondisi daerah yang sering terjadi konflik, menimbulkan keraguan dan penolakan bagi investor untuk melakukan investasi di daerah. Dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang kondusif dan aman, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dan instansi terkait, telah melakukan berbagai upaya dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan gejolak dan konfik sosial di masyarakat. Berdasarkan data yang ada dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Malinau merupakan daerah yang kondusif bagi aktifitas investasi karena rendahnya tingkat kriminalitas dan pelanggaran kamtibmas di Kabupaten ini (Lihat Tabel 2.50)

Tabel 2. 50
Tindak Kriminal dan Pelanggaran Kamtibmas Kabupaten Malinau Tahun 2016–2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Kejahatan Kesusilaan	8	1	2	n.a

Perjudian	0	1	0	n.a
Kejahatan Terhadap Nyawa	1	0	0	n.a
Penganiayaan	13	12	12	n.a
Menyebabkan Mati/Luka Karena Alpha	0	0	0	n.a
Pencurian	34	8	10	n.a
Pemerasan Dan Pengancaman	2	1	2	n.a
Penggelapan	6	4	6	n.a
Penadahan	0	0	0	n.a
Kejahatan Penerbitan Dan Percetakan	0	0	0	n.a
Tindak Pidana Ekonomi	3	0	0	n.a
Tindak Pidana Senjata Tajam	4	3	0	n.a
Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika	24	49	24	n.a
Tindak Pidana Perlindungan Anak	0	4	2	n.a
Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	17	24	32	n.a
Tindak Pidana Devisa	0	0	0	n.a
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)	0	2	1	n.a
Tindak Pidana Lain	22	18	6	n.a
Jumlah	134	127	97	n.a

Sumber: Kepolisian Resor Malinau (2020)

2. Perizinan

Pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang telah dibentuk di Kabupaten Malinau, merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat dan prima. Percepatan dan perbaikan dalam sistem pelayanan perizinan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Malinau yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan luar negeri. Jenis perizinan yang paling banyak diterbitkan oleh Kabupaten Malinau diantaranya yaitu Izin Mendirikan Bangunan, Izin usaha jasa kontruksi (IUJK), Surat Izin Praktek Dokter (umum, special, dan gigi), surat izin praktek perawat, surat izin praktek bidan. Berbagai jenis perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukan daya saing (kemampuan) pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan perijinan usaha.

Tabel 2. 51
Perizinan yang Diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020

DINAS/BIDANG	JENIS PERIZINAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
Bidang Penanaman Modal	Izin Prinsip	1	1	0	n.a
Dinas PU Dan PERKIM	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	59	88	31	n.a
	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	12	21	15	n.a
	Izin Reklame	0	0	0	n.a
	Sertifikat Laik Fungsi	0	0	0	n.a
Bidang Kesehatan	Surat Izin Praktek Dokter (Umum, Spesialis, Dan Gigi)	22	26	63	n.a
	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA), Izin Apotek	07-Jan	3	11	n.a
	Surat Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian (SIPTTK)	0	6	12	n.a
	Surat Izin Praktek Apoteker Pengganti Dan Pendamping (SIPAPP)	0	1	1	n.a
	Surat Izin Praktek Asisten Apoteker (SIPAA)	11	0	0	n.a
	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)	28	72	169	n.a
	Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG)	0	0	12	n.a
	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	14	78	120	n.a
	Izin Apotik	1	3	1	n.a
	Izin Toko Obat	1	1	1	n.a
	Surat Izin Pengobatan Tradisional (Akupuntur, Refleksionis, Shinse Dan Tabib	0	0	0	n.a
	Izin Tukang Gigi	0	0	0	n.a
	Izin Optikal	0	1	0	n.a
	Izin Klinik Kesehatan	0	0	1	n.a
	Izin Operasional Puskesmas	0	0	0	n.a
	Izin Kesehatan Jasa Boga Dan Catering	1	3	0	n.a
	Izin Kesehatan Warung Dan Restoran	0	1	0	n.a
	Izin Pusat Kebugaran	0	0	0	n.a
	Izin Salon	1	0	0	n.a
	Izin Pengecer Pestisida	0	0	0	n.a
	Surat Izin Kerja (SIK) Bidan	0	0	0	n.a
	Surat Izin Kerja (SIK) Perawat Gigi	0	0	0	n.a
	Izin Praktek Gizi (SIPG)			7	n.a
	Izin Depo Air Minum	1	0	0	n.a
	Surat Izin Praktek Perekaman Medis Informasi Kesehatan (SIPPMIK)	0	0	3	n.a
	Surat Izin Praktek Analis Kesehatan (SIPAK)	0	0	15	n.a
	Surat Izin Kesehatan Lingkungan (SIKL)	0	0	1	n.a
	Surat Izin Praktek Petugas Fisioterapi (SIPPF)	0	0	0	n.a
	Surat Izin Praktek Petugas Elektromedis (SIPPE)	0	0	1	n.a
	Surat Izin Praktek Petugas Radiologi (SIPPR)	0	0	2	n.a
Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	97	108	26	n.a
	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	153	143	20	n.a
	Izin Usaha Industri (IUI)	0	0	0	n.a
	Izin Perluasan (IP)	0	0	0	n.a
	Izin Moulding	0	0	0	n.a
Bidang Perhubungan	Izin Usaha Angkutan/Perusahaan Angkutan Umum	0	0	0	n.a

DINAS/BIDANG	JENIS PERIZINAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	0	0	2	n.a
	Izin Angkutan Orang Dalam Trayek	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Angkutan Barang Di Jalan	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau	0	0	0	n.a
	Izin Trayek/Izin Operasi	0	0	0	n.a
	Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	0	0	0	n.a
	Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	0	0	0	n.a
Bidang Pariwisata	Izin Usaha Hotel Berbintang Dan Melati	1	0	0	n.a
	Izin Usaha Rumah Makan	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Hiburan	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Restoran	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Kos-Kosan Diatas 10 Kamar	0	0	0	n.a
Bidang Pertanahan	Izin Lokasi Atas Tanah	1	8	0	n.a
Bidang Pertanian	Izin Usaha Perkebunan	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman	0	0	0	n.a
Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Izin Usaha Proses Produksi	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Penanganan Pasca Panen	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Prouksi Dan Penanganan Pasca Panen	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Pembenihan Tanaman	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Budidaya Hortikultura	0	0	1	n.a
	Izin Usaha Perbenihan Hortikultura	0	0	0	n.a
Bidang Peternakan	Izin Usaha Budidaya Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing, Domba, Rusa, Ayam Pedaging, Ayam Ras Petelur, Ayam Buras, Itik, Angsa Dan Entok)	0	0	0	n.a
	Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Pemotongan Hewan Dan Unggas	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Pemasukan Dan/Atau Pengeluaran Ternak/Hewan	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Pemasukan Dan/Atau Pengeluaran Bahan Asal Ternak (Kulit, Susu, Daging Dan Ternak)	0	0	0	n.a
	Izin Usaha Obat Hewan	0	0	0	n.a
	Usaha Peternakan Lainnya	0	0	0	n.a
Bidang Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan Hidup	0	0	0	n.a
	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	0	0	0	n.a
	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air	0	0	0	n.a
Bidang Tenaga Kerja	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	0	0	0	n.a
	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	0	0	0	n.a
Bidang Pendidikan	Izin Operasionalpusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PBKM)	0	0	0	n.a
Bidang Perikanan	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	0	0	0	n.a
Bidang Kehutanan	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	0	0	0	n.a
Bidang Perdagangan Dan	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	160	147	0	n.a
	Tanda Daftar Industri (TDI)	0	5	0	n.a

DINAS/BIDANG	JENIS PERIZINAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
Perindustrian	Tanda Daftar Gudang (TDG)	0	0	0	n.a
Bidang Pertanian	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunana Usaha Budidaya (STD-B)	0	0	0	n.a
Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Tanda Daftar Usaha Hortikultura	0	0	1	n.a
Bidang Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0	0	0	n.a
Bidang Penanaman Modal	Surat Keterangan Domisili Perusahan (SKDP)	0	0	0	n.a
	Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan (SKPP)	0	0	0	n.a
Bidang Lingkungan Hidup	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan	0	0	0	n.a
	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)	0	0	0	n.a
	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (SIPPL)	0	0	9	n.a
Bidang Kesbangpol	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	0	0	12	n.a
Bidang Tenaga Kerja	Kartu Antar Kerja 1 (AK.1)	0	0	410	n.a
	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	0	0	0	n.a
Bidang Dinas Perikanan	Tanda Catat	0	0	0	n.a
Bidang Dinas Perhubungan	Izin Rekomendasi Terminal Khusus (Tersus)	0	0	0	n.a

Sumber: DPMPTSP Malinau, 2020

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Seperti yang telah dibahas pada sub bab terdahulu, jika dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Malinau berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Malinau didominasi oleh kelompok umur 15-64 tahun, sedangkan kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) mengalami peningkatan dengan angka peningkatan yang signifikan. Sementara, untuk kelompok usia tua mengalami kecenderungan tidak mengalami perubahan yang berarti. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi peningkatan daya saing Kabupaten Malinau untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, yang diiringi dengan program-program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai catatan khusus, bahwa dari penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikannya di ketahui bahwa umumnya adalah berpendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah (79,78%), sedangkan yang berpendidikan tinggi terkonsentrasi pada Pegawai Negeri Sipil (57,50% dari 3.365 PNS).

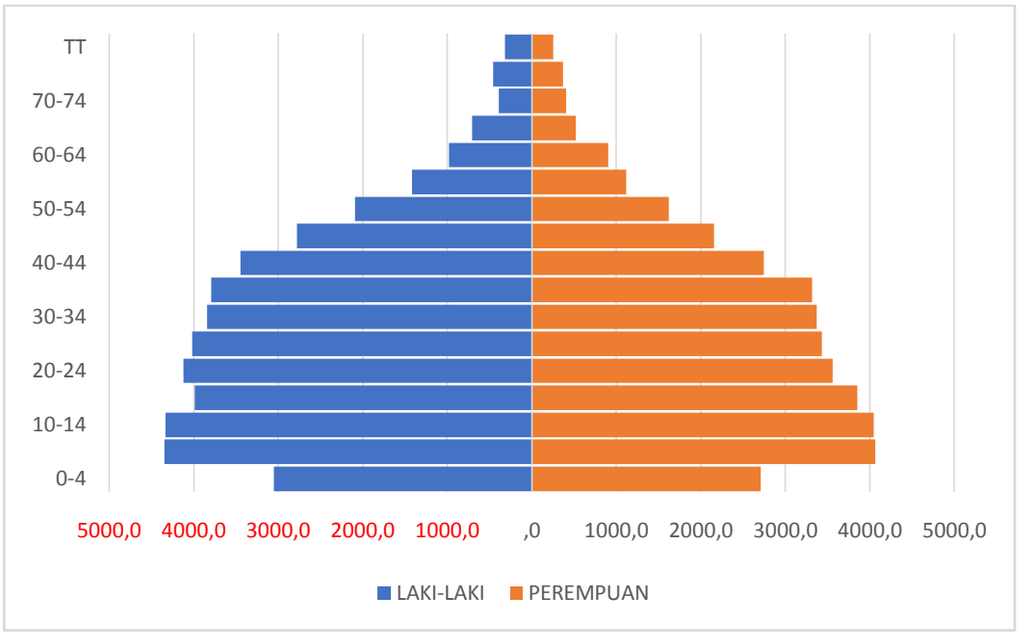

Gambar 2. 15**Komposisi Penduduk Kabupaten Malinau Menurut Kelompok Umur Tahun 2015-2019**

Sumber :Malinau Dalam Angka 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau (2020)

2.5. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Menindaklanjuti amanat dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan
6. Sosial

2.5.1. Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Adapun realisasi SPM bidang pendidikan adalah:

1. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Angka Partisipasi PAUD di Kabupaten Malinau mencapai 60,20 persen.
2. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan dasar adalah anak SD/ Mi/SMP/MTs /sederajat. Pada tahun 2020 persentase Pendidikan dasar yang mendapat layanan pendidikan di Kabupaten Malinau adalah 99,40 persen.
3. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan kesetaraan adalah anak SD/Mi/SMP/MTs/sederajat. Pada tahun 2020 persentase Pendidikan kesetaraan yang mendapat layanan pendidikan di Kabupaten Malinau adalah 95,24 persen.
4. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan terkait dengan guru dan tenaga kependidikan adalah pemenuhan

ketersediaan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standart Layanan Minimal. Pada tahun 2020, Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi minimal S1/DIV di Kabupaten Malinau capaiannya adalah 85,99 persen untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama/MTs.

2.5.2. Kesehatan

Operasionalisasi SPM Bidang Kesehatan berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar. Adapun realisasi SPM bidang Kesehatan adalah

a. pelayanan kesehatan ibu hamil 80,3 persen;

b. pelayanan kesehatan ibu bersalin 91,6 persen;

c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 79,8 persen;

d. pelayanan kesehatan balita 57,1 persen;

e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 41,1 persen;

f. pelayanan kesehatan pada usia produktif 100 persen;

g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100 persen;

h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100 persen;

i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 100 persen;

j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100 persen;

k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 100 persen; dan

l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif 100 persen.

2.5.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada pemerintah provinsi meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan Air Minum sehari-hari kabupaten/kota Pemenuhan SPM kebutuhan Air Minum sehari-hari lintas kabupaten/kota untuk tahun 2020 sebesar 0,57 persen

2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik lintas kabupaten/kota Pemenuhan SPM penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota untuk tahun 2020 sebesar n/a (not available), hal ini dikarenakan belum ada realisasi pembangunan pengolahan air limbah lintas kabupaten/kota sebesar 80 persen.

2.5.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT /M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada pemerintah daerah meliputi :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah. Pemenuhan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten Malinau untuk tahun 2020 sebesar 0
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. Pemenuhan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk tahun 2020 sebesar 0.

2.5.5 Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Pasal 9 sebagai berikut :

a) SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota.
b) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.
c) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
    1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 100 persen;
    2. pelayanan informasi rawan bencana data n.a;
    3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana data n.a;
    4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana data n.a; dan
    5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 persen.

2.5.6 Sosial

Operasionalisasi SPM Bidang sosial berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang standar pelayanan

dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi meliputi

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti 0 persen,
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti,
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti 0 persen,
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 0 persen, dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten data n.a (not available).

2.6. CAPAIAN KINERJA SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil pembangunan yang diharapkan dari suatu tujuan pembangunan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Berbagai capaian pembangunan seharusnya dapat terlihat pada sasaran pembangunan (sasaran pokok) dengan indikator sebagai tolok ukurnya. Dalam rumusan perencanaan pembangunan, terdapat sebanyak 42 indikator pada pelaksanaan pembangunan RPJMD 2016-2021 yang diselaraskan pada 23 sasaran pembangunan daerah. Secara umum, capaian pembangunan Kabupaten Malinau di tahun 2019 “Sangat Tinggi” dengan capaian kinerja 114,22 persen dibandingkan target 2019 dan sebesar 105,02 persen jika dibandingkan dengan target akhir pelaksanaan pembangunan jangka menengah yakni tahun 2021. Jika melihat perbandingan pembangunan di tahun 2019, maka dari 42 indikator tersebut di atas sebanyak 32 indikator berkategori “Sangat Tinggi” (76,19%) dan kategori “Tinggi” hanya 1 (satu) indikator saja (2,38%). Adapun pada perbandingan dengan target akhir RPJMD Malinau yakni tahun 2021, maka terdapat 27 indikator memiliki capaian “Sangat Tinggi” (64,29%) dan capaian “Tinggi” sebanyak 6 indikator (14,29%).

Tabel 2. 52
Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR	STATUS
Meningkatnya mutu pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	Sangat Tinggi
	Harapan lama sekolah (tahun)	Sangat Tinggi
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Sangat Tinggi
Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (tahun)	Sangat Tinggi
	Prevalensi Balita Stunting	Sangat Tinggi
Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	Sangat Tinggi
	Persentase Penduduk Miskin (%)	Sangat Tinggi
Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tk.Partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam Musrenbang (%) wisatawan	Sangat Tinggi
Meningkatnya infrastruktur daerah baik diperkotaan maupun perdesaan	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar (%)	Tinggi
	Persentase Jalan dalam kondisi baik/mantap (%)	Sangat Tinggi
	Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas (%)	Sangat Tinggi
Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi (%)	Sangat Tinggi
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Sangat Tinggi
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan Perkotaan	Pendapatan Perkapita Masyarakat (Rp)	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini	Sangat Tinggi
Terbukanya Lapangan Pekerjaan	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (%)	Rendah
	Menurunnya angka pengangguran/Tk. Pengangguran (%) terbuka	Sangat Tinggi
Mengembangkan Produk Unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan (%)	na
Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) perdagangan	Sangat Tinggi
	Kontribusi sektor industri terhadap	Rendah

SASARAN	INDIKATOR	STATUS
	PDRB (%)	
	Tingkat pertumbuhan perdagangan (%)	Sangat Rendah
Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat Pertumbuhan Industri (%)	Sangat Tinggi
Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Persentase Konflik SARA yang diselesaikan	Sangat Tinggi
	Rasio tempat ibadah per penduduk	Sangat Tinggi
Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konfik SARA	Persentase Konflik SARA %	Sangat Tinggi
	Indek kualitas lingkungan hidup	Sangat Tinggi
Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	Sangat Tinggi
	Indeks kualitas udara (ISPU)	Sangat Tinggi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indek Reformasi birokrasi	Sangat Tinggi
	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Sangat Tinggi
	Nilai Sakip	Rendah
	Nilai LPPD	Sangat Tinggi
Meningkatnya kesetaraan gender	Indek pembangunan gender (%)	Sangat Tinggi
	Indek pembangunan gender (%)	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indek pemberdayaan gender (%)	na
Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	Sangat Tinggi
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Sedang
	Jumlah wisatawan	Sangat Tinggi
Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif (%)	Sangat Tinggi
Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di kementrian pendidikan dan kebudayaan (Cagar Budaya) (%)	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sedang
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Sedang
RATA-RATA CAPAIAN		**Sangat Tinggi**

Secara umum, kesimpulan yang didapatkan dari berbagai evaluasi perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sudah terlihat kesesuaian sistematika maupun substansi rumusan RPJMD dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Penyusunannya RKPD 2017-2019 dilakukan sebelum dirumuskan perubahan RPJMD 2016-2021 sehingga evaluasi pembangunan tahun 2016-2019 khususnya dalam melihat uraian program dan kegiatan pembangunan maupun keuangan daerah terlihat belum selaras. Meskipun begitu, secara konten masih memiliki beberapa poin yang terintegrasi meskipun memiliki nomenklatur yang berbeda;
3. Terdapat perbedaan antara rumusan program dalam RPJMD 2016-2021 dengan Rencana Strategis OPD 2016-2021;
4. Semakin rendahnya capaian status kinerja pembangunan daerah ketika mendekati titik akhir RPJMD 2016-2021 mengindikasikan penurunan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
5. Belum adanya capaian program pembangunan tahun 2021 karena masih berjalan; dan
6. Belum optimalnya ketersediaan data dalam mendukung evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD 2016-2021.

Sedangkan rekomendasi perbaikan dalam evaluasi perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau untuk menyempurnakan pembangunan Kabupaten Malinau periode pembangunan 2021-2026:

1. Penyesuaian setiap tahapan rumusan perencanaan pembangunan jangka menengah dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Melakukan sinkronisasi kembali antara program pada rumusan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026;
3. Meninjau kembali berbagai program yang memiliki capaian status kinerja rendah dan tergolong stagnan serta merumuskan ulang program bersangkutan untuk

meningkatkan akselerasi capaian hasil pelaksanaan pembangunan;

4. Perlu peninjauan kembali tujuan, sasaran dan indikator yang belum relevan dengan konsep pembangunan maupun dalam hal ketersediaan data secara berkesinambungan; dan
5. Perlu adanya penyempurnaan dalam perumusan permasalahan dan isu strategis yang up to date maupun arah kebijakan dan program kegiatan yang sesuai dengan potensi daerah dan perkembangan jaman.